

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN NILAI-
NILAI LOKAL MASYARAKAT ADAT AMMA TOA
KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA**

Jurnal

**Untuk memenuhi sebagian Persyaratan
untuk mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Oleh

Ahmad Yulisar B.N

E121 10 002

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi

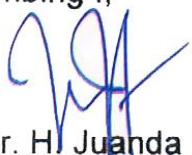
**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN NILAI-
NILAI LOKAL MASYARAKAT ADAT AMMA TOA
KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh
Ahmad Yulisar B.N
E 121 10 003

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi
Pada tanggal 1 Desember 2014
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si
NIP. 19500117 198003 1 002

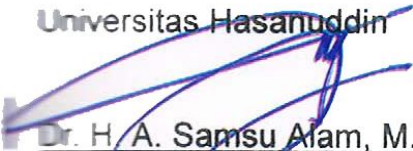
Pembimbing II,



Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
NIP. 19630921 198702 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si
NIP. 19641231 196903 1 027

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
NIP. 19630921 198702 2 001

LEMBARAN PENERIMAAN

Skripsi

yang dipersiapkan dan disusun oleh
Ahmad Yulisar B.N
E12110003

Telah diperbaiki
dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas hasanuddin

Makassar, Pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2014

Menyetujui :

Ketua : Prof. Dr. Juanda Nawawi M.Si

Sekretaris : A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.

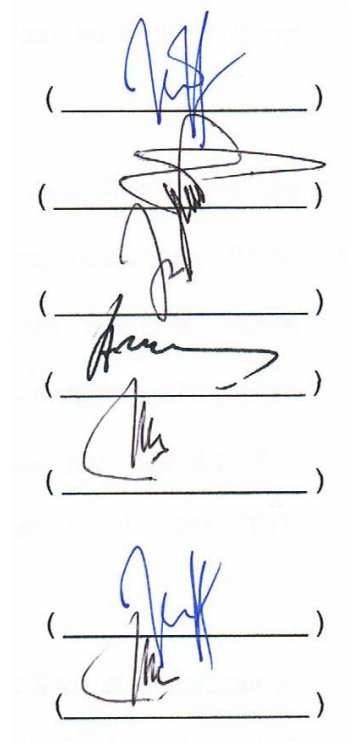
Anggota : 1. Dr. Rabina Yunus, M.Si.

2. Dr. H. A. Gau Kadir, M.Si.

3. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si

Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si

2. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si



(_____)
(_____)
(_____)
(_____)
(_____)
(_____)
(_____)
(_____)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin puji syukur atas nikmat Islam, iman, kesehatan serta kesempatan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dzat pemilik alam semesta serta segala kehidupan dan kematian didalamnya. Pantaslah kita untuk senantiasa memuja dan memuji kebesaran serta keagungan-Nya. Semoga kita selalu berada dalam ridho Ilahi ditiap aktifitas keseharian kita.

Allahumma Shalli Alasayyidina Muhammad Waala Alihi Wasahbihi Wasallim, shalawat dan salam teriring kehadiran Rasulullah SAW. Pemimpin terbaik yang menginspirasi peradaban manusia, sosok revolusioner sejati yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke kehidupan yang bernafaskan Islami. Semoga beliau, para sahabat dan pengikutnya senantiasa mendapat tempat istimewa disisi Allah SWT. Amiin.

Rasa syukur yang mendalam penulis sampaikan atas selesainya penulisan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Adat Amma Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba” sebagai salah satu syarat penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penulis berharap skripsi ini senantiasa memenuhi hakikatnya, yaitu memberikan sumbangsih pemikiran khususnya dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya serta rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Terimakasih kepada Ibu Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar banyak hal hingga mampu menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di kampus terbesar di Timur Indonesia ini
2. Bapak Prof. Dr. Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.
4. Kepada Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si selaku pembimbing I dan kepada Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku pembimbing II, yang tiada jenuh-jenuhnya memberikan bimbingan, memotivasi, membantu, dan mendorong penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Kepala

Kecamatan Kajang, serta Kepala Desa Tanah Towa yang telah banyak memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga memudahkan dalam penyelesaian skripsi ini

6. Ayahanda Muhammad Sahib Barang S.Pd,I dan Ibunda Nurhaya Sahib S,Pd.

Terimakasih telah berkorban sedemikian banyak untuk ananda, suatu pengorbanan yang sungguh maha berat bagi ananda untuk membalasnya barang secuilpun. Terimakasih telah mengajarkan banyak nilai-nilai kehidupan kepada ananda, senantiasa mengajarkan agar selalu bijak semenjak dalam pikiran, menuntun penulis untuk selalu berikhtiar dalam tiap usaha, membiasakan penulis untuk bertata krama sejak dari dalam rumah, dan tentu saja kasih sayang yang sulit ananda dapatkan tandingannya dari manusia lain. Usiamu kini semakin menua, semoga Allah SWT berkenan memberikan anakmu daya untuk merawat dan membahagiakanmu hingga kelak Allah sendiri yang memberimu peristirahatan terbaik. *Rabbighfiri waliwalidayya warhamhumakama rabbayana saghira*, Amin. Kepada Kakanda penulis, Sry Susmila SE. Terimakasih telah ikhlas berbagi kasih sayang dengan penulis, mari berusaha lebih keras lagi agar kita berdua sanggup membiasakan Tetta dan Mama tersenyum bangga kepada kita.

7. Kepada Nurul Fibrianti S.Ip, atas segala motivasi yang telah diberikan sehingga penulis berani mengambil langkah awal sampai sanggup menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran hingga tak jenuh-jenuhnya membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Saudara di negeri rantau, Dedi Ahmad Mattuppuang, Ali Amran Asra SH, Ahmad Saad S.TP, Andi Ishak Salma ST, Dedi Dermawan Armadi SH, dan Muh. Erwin Syah, terimakasih telah rela berbagi sepiring nasi seribu pengalaman, dan jutaan motivasi di rantauan.
9. Keluarga kecil mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2010, Volksgeist asuhan Anugrah Rachmat. Saudara dan saudariku Akhmad Akhsan, Kurniawan Akbar, Novri Ardi, Rian Faisal Hidayat, Bonde Arizona, Nazruddin, Surya Arisman, Widayani Permatasari, Alfiani Ekasari, Andi Meegie Senna, Resky Sri, Neli Sari, Andi Acil, Andi Ilmi Irwan, Reza Syamsuri, M. Yusuf, Ayyub Siswanto, Muhammad Ikram, Muhammad Wahyu, Lulu Fibrianti, Ismail H. Mawi, Rimba, Amal, Andi Riska, Kasbi Suriansyah, A. Wahyu Arfansyah, Wandu, Nurkumala Sari, Dian Riska, Dina Astuti, Nana Listianah, Tanti Prast, Andi Nurhidayah, Metalia Intan, Tuti Hadi, Novianti, Evi Mulyasari, Andi Yenni, Ikka Monika, Sambolangi, terima kasih atas untaian kisah, dan kebersamaan yang telah kalian bagi, cerita kita akan terkenang nyata dalam rasa dan pikiran. Semoga ada ruang kebersamaan dilain hari untuk kita.

10. Generasi kebanggan zaman, generasi emas Universitas Hasanuddin, para Laskar Merdeka Militan, saudara serahim, memupuk kisah klasik di rumah jingga HIMAPEM. Kakanda Revolusioner 05, Rez Publica 06, Renaissance 07, Glasnost 08, Aufklarung 09, terimakasih atas berbagai pembelajaran dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis. Adinda Enlightenment 11, Fraternity 12, Lebensraum 13 penulis mengucapkan terimakasih atas kebersamaan dan keberanian kalian melanjutkan perjuangan ini, maafkan sebab penulis tak bisa bersama lebih lama. Seiring dengan berakhirnya masa studi penulis, maka izinkanlah kuakhiri sejarah ini dan kutitipkan pena untuk dijadikan mahakarya baru bagi adik-adikku. Jadilah arif dan bijak sejak dalam pikiran, Jayalah Himapem ku Jayalah Himapem kita !
11. Kepada rekan-rekan Sospol 2010, luar biasa niatan tulus dan keberanian untuk membangunkan KEMA FISIP UNHAS dari tidur panjangnya. Satu hal yang penulis pelajari dari kebersamaan selama ini, untuk melakukan hal besar tidak cukup dengan niatan, kita perlu tindakan ! Semoga regenerasi terus berkelanjutan di lembaga tingkatan fakultas. Bersama Bersatu Berjaya !
12. Kepada seluruh pihak yang tak kuasa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis sejak, selama, dan hingga penulis menyelesaikan studi Strata Satu di Universitas Hasanuddin.

Selain itu, penulis mengucapkan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas segala khilaf yang penulis lakukan saat berucap dan bertindak semenjak pertama kali penulis menginjakkan kaki di Universitas Hasanuddin hingga saat ini. Pada akhirnya, kepada Allah SWT jualah segala sesuatu kembali, dzat pemilik kehidupan dan kematian.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, November 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Peran	11
2.2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah	13
2.3 Masyarakat Adat	18
2.4 Masyarakat Adat Amma Toa Kajang	21

2.5	Konsep Nilai	26
2.6	Kerangka Konseptual	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Lokasi Penelitian	35
3.2.	Informan Penelitian	35
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	36
3.4.	Defenisi Operasional	37
3.5.	Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Profil Daerah Penelitian	41
4.1.1	Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba	42
4.1.2	Keadaan Sosial Budaya	45
4.2.	Eksistensi masyarakat adat <i>Amma Toa</i> terhadap nilai-nilai <i>Pasang ri Kajang</i>	49
4.2.1	<i>Pasang ri Kajang Dalam Masyarakat</i> <i>Adat Amma Toa</i>	50
4.2.2	Prinsip <i>Tu Kamase-masea</i> Dalam Kekinian Masyarakat <i>Amma Toa</i>	59

4.2.3 Eksistensi <i>Pasang ri Kajang</i> Dalam	
Masyarakat Adat Amma Toa	60
4.3. Peran Pemerintah Daerah dalam pelestarian	
nilai-nilai lokal masyarakat adat Amma Toa	65
4.3.1 Kebijakan Pemerintah	65
4.3.1.1 Payung Hukum Masyarakat Perlindungan	
Kawasan Adat Amma Toa.....	66
4.3.1.2 Upaya Pemerintah Daerah dalam	
Pemberdayaan Masyarakat Adat	70
4.3.2 Sistem Pemerintahan Daerah dan	
Kelembagaan Adat.....	73
4.3.3 Struktur Kelembagaan Adat Amma Toa	78
4.3.4 Eksistensi Ada' Lima Karaeng Tallua	90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	91
5.2. Saran.....	93

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	46
Tabel 4.1.2	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	47
Tabel 4.1.3	Keadaan Pendidikan Masyarakat	48
Tabel 4.1.4	Jumlah Murid dan Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual “Peran Pemerintah Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Adat Amma Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”	34
Gambar 4.1. Peta Kabupaten Bulukumba	42
Gambar 4.2 Struktur Kelembagaan Adat Amma Toa	89

INTISARI

AHMAD YULISAR B.N. NIM E 121 10 003. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN NILAI-NILAI LOKAL MASYARAKAT ADAT AMMA TOA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah bimbingan **Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si** dan **Dr. Hj. Nurlinah, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi masyarakat adat Amma Toa terhadap ajaran atau nilai yang diturunkan dari leluhur dalam ajaran *Pasang ri Kajang* dan bagaimana peran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menjaga kelestarian nilai-nilai lokal masyarakat adat Amma Toa. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terhadap perlindungan, pengembangan, dan pelestarian masyarakat adat Amma Toa Kajang. Dari sisi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama mengenai peranan pemerintah dalam pelestarian kebudayaan lokal.

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk kata dan kalimat, yang selanjutnya menjadi suatu kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Amma Toa Kajang tengah mengalami degradasi nilai *Pasang ri Kajang* yang terutama diakibatkan oleh arus kencang modernisasi yang perlahan namun pasti mulai memasuki kehidupan masyarakat adat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba mengambil peran sebagai pelindung kebudayaan lokal melalui usulan rancangan peraturan daerah tentang pengukuhan dan perlindungan masyarakat hukum adat Amma Toa Kajang meski sampai dirampungkannya

skripsi pada desember 2014 ini, peraturan daerah tersebut belum disahkan. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba bekerjasama dengan lembaga internasional yang membidangi kebudayaan telah melakukan bantuan pengadaan alat tenun untuk membudidayakan kebiasaan menenun sarung yang dilakukan oleh perempuan Amma Toa, Pemerintah juga sedang merencanakan pelaksanaan festival budaya sebagai wadah promosi kebudayaan untuk memperkenalkan kebudayaan masyarakat adat Amma Toa ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Dari segi infrastruktur, Pemerintah juga telah menganggarkan pembenahan jalan menuju kawasan adat Amma Toa sebagai program prioritas di periode tahun 2013-2014. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba juga akan mengusahakan usulan masyarakat adat Amma Toa Kajang sebagai situs warisan dunia ke UNESCO.

ABSTRACT

AHMAD YULISAR B.N. NIM E 121 10 003. THE ROLE OF GOVERNMENT IN THE PRESERVATION OF VALUES OF INDIGENOUS PEOPLES AMMA TOA KAJANG of BULUKUMBA REGENCY, under the guidance of **Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si** and **Dr. Hj. Nurlinah, M.Si**

This study aims to determine how the existence of indigenous peoples against the teachings of Amma Toa or value derived from the ancestral teachings *ri Kajang Posting* and how the role of Local Governments Bulukumba in preserving the local values of indigenous peoples Amma Toa . The results of this study are expected to be input for Local Government Bulukumba in formulating policies for the protection , development , and preservation of indigenous peoples Amma Toa Kajang . From the academic side , the results of this study are expected to be useful for the development of the science of government , especially regarding the government's role in the preservation of local culture .

This type of research used is descriptive. Data collected by qualitative methods using observation , interview , and literature study. The data obtained and described in the form of words and sentences , which subsequently became a research conclusions .

The results showed that the indigenous peoples of Amma Toa Kajang undergoing degradation value of *Pasang ri Kajang* which is mainly caused by the strong currents of modernization that is slowly but surely began to enter the lives of indigenous peoples. Local Government Bulukumba take on the role as the protector of the local culture through the draft proposal and the strengthening of local regulations on the protection of indigenous peoples Amma Toa Kajang though until the completion of this thesis in December 2014, local regulations had not been ratified. Furthermore Bulukumba Local Government in collaboration with international agencies in charge of culture has done procurement assistance to cultivate habits loom weave holster

made by Amma Toa's women, the Government is also planning the implementation of the cultural festival as a forum for the promotion of culture to introduce indigenous culture Amma Toa to throughout Indonesia and the world. In terms of infrastructure, the Government has also budgeted revamping the way to the indigenous region Amma Toa as a priority program in the period 2013-2014. Local Government Bulukumba also will seek proposals indigenous peoples Amma Toa Kajang as a UNESCO world heritage site.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu syarat penting dalam teori pembentukan negara adalah adanya Pemerintah. Pemerintah dalam suatu wilayah berperan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu yang menjadi kekuasaannya. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan berperan sebagai lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan memajukan kesejahteraan rakyat dan negara.

Sebagai negara yang berpenduduk besar, Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia. Tantangan bagi pemerintahan di Indonesia baik di pusat maupun di daerah juga cukup besar yaitu seberapa jauh mereka mampu mempraktikkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Strategi yang tepat dalam mewujudkan *good governance* ini adalah efektivitas pemerintah dalam berkomunikasi dengan rakyatnya. Dan salah satu cara untuk mewujudkan komunikasi dengan rakyat adalah dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat dalam praktek pemerintahan.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang

mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Di Indonesia kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan seterusnya. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, *folklore*), dan manuskrip (Suyono Suyatno: 2014).

Sebagai instansi yang paling memungkinkan untuk mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat dari bawah, maka pemerintah daerah adalah pihak yang sangat tepat untuk mempraktekkan kearifan lokal dalam pelaksanaan pemerintahan. Secara umum kearifan lokal masyarakat yaitu nilai kejujuran, kegigihan, ketakwaan, kebersahajaan, dan nilai gotong royong,

Jika nilai kejujuran dijunjung tinggi dalam tata laksana pemerintahan, maka tidak akan lagi ada kasus korupsi, jika kegigihan dalam melayani masyarakat dipraktekkan maka tidak akan ada lagi masyarakat yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintahnya, jika ketakwaan selalu diterapkan dalam pemerintahan maka sulit rasanya untuk menemui pejabat yang ingkar dari kewajibannya serta tak akan ada rakyat yang memurkai pejabatnya, dan

jika kebersahajaan dimiliki oleh pejabat dan rakyatnya maka keselarasan dalam keseharian akan mereduksi perbedaan status sosial dalam masyarakat. Kalau gotong royong dilakukan oleh pemerintah bersama rakyatnya maka setiap permasalahan sosial akan mudah menemui solusi.

Oleh karena pemerintah secara hakiki berfungsi membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan, mencerdaskan, memberdayakan, serta melindungi, seluruh masyarakatnya maka sangatlah bijak mengoptimalkan kearifan lokal dalam pelaksanaan pemerintahan.

Nilai kearifan lokal tersebut hampir dimiliki oleh seluruh daerah di Indonesia, hanya saja dalam realitasnya kita sangat jarang mendapati kearifan lokal yang diberdayakan dalam keseharian sebagai akibat langsung dari era globalisasi. Dan ditengah langkanya realisasi kearifan lokal dalam hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakatnya, kita patut bersyukur masih ada komunitas masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kearifan lokal dalam keseharian mereka. Komunitas masyarakat tersebut adalah masyarakat tradisional atau sering disebut masyarakat adat.

Masyarakat adat yang dimaksud adalah komunitas masyarakat tradisional yang terasing dari kehidupan modernitas secara umum yang terikat pada nilai-nilai leluhur dan kepercayaan mereka masing-masing.

Kedudukan masyarakat adat tersebut, oleh negara telah terakui bahkan secara konstitusional yaitu dalam UUD 1945 pada Pasal 18b ayat 2. Otonomi Daerah yang dianut oleh negara bahkan secara tegas

menuangkannya dalam UU No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

UU No 32 Tahun 2004 Bab I Pasal 2 ayat (9) tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu komunitas masyarakat adat di Indonesia, adalah masyarakat adat Amma Toa Kajang di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat adat Amma Toa secara turun temurun hidup mendiami desa Tana Toa, Kecamatan Kajang yang kira-kira terletak 90 KM arah timur dari ibukota Kabupaten Bulukumba atau sekira 240 KM di selatan kota Makassar Sulawesi Selatan.

Secara geografis dan administratif, masyarakat adat Kajang terbagi atas Kajang Dalam dan Kajang Luar. Namun, hanya masyarakat yang tinggal di kawasan Kajang Dalam yang masih sepenuhnya berpegang teguh kepada adat Amma Toa. Mereka mempraktekkan cara hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbaur teknologi dan modernitas. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka, karena bersifat merusak kelestarian sumber daya alam. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat Amma Toa.

Masyarakat Amma Toa sangat berpegang teguh pada ajaran *Pasang ri Kajang*. Sebuah pedoman hidup yang berisikan pesan-pesan (*Pasang*) berbentuk firman ataupun ajaran-ajaran kehidupan yang diturunkan oleh *Tu Riek Akra'na* (Yang Maha Berkehendak) kepada masyarakat Amma Toa yang kemudian dijadikan kewajiban bagi masyarakat adat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat Amma Toa dipimpin oleh seorang pemangku adat yang disebut Amma Toa.

Pesan yang termaktub dalam *Pasang ri Kajang* tersebut mengajarkan tiap-tiap sendi kehidupan sosial masyarakat adat Amma Toa Kajang. Didalam *Pasang* disebutkan bahwa komunitas Amma Toa akan selalu memegang konsep hidup *kamase-masea* atau hidup sederhana. Kesederhanaan ini terlihat dari cara mereka berpakaian, yang seluruhnya berwarna hitam sebab menurut kepercayaan mereka hitam akan selalu mengingatkan mereka tentang gelapnya di dalam rahim ibu, serta gelapnya di dalam kubur kelak. Warna hitam juga bermakna filosofis, bahwa tak ada hitam yang lebih baik daripada warna hitam yang lain. Artinya bahwa semua sama dihadapan *Tu Riek Akra'na*.

Pasang ri Kajang juga mengajarkan agar selalu menjaga kelestarian hutan. Ini terlihat jelas dari implementasi kehidupan masyarakat adat Amma Toa, mereka tidak diperbolehkan menebang hutan secara sembarangan. .

Ini dilakukan sebab masyarakat adat Amma Toa sangat percaya bahwa hutan dan alamnya ada untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Sehingga ketika hutan dirusak maka akan rusak pula sumber kehidupan manusia. Prinsip ini terus mereka jaga hingga kini, terbukti dari model rumah-rumah masyarakat adat Amma Toa yang meskipun terbuat dari bahan kayu, namun kesamaan model dan kesederhanaannya tidak membuat mereka menebang kayu di hutan secara sembarangan.

Keseriusan masyarakat adat Amma Toa dalam memelihara kelestarian alam dan kehidupan yang sederhana bagaikan oase di tengah gurun pasir. Jangankan diperkotaan, di Desa di luar Kawasan Adat sekalipun telah banyak kita melihat pengeksploitasian lingkungan secara sembarangan oleh kerakusan manusia. Rusaknya ekosistem hidup yang secara langsung merusak sumber daya alam di negeri ini, dan juga seolah mengundang bencana seperti kekeringan dimusim kemarau ataupun banjir dan longsor dimusim penghujan. Sebagai contoh nyata adalah adanya pengklaiman sepihak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Bulukumba terhadap hutan kawasan adat. Hal yang sangat miris mengingat masyarakat adat Amma Toa begitu menjaga hutan adat mereka.

Selain itu, keberadaan negara yang pada dasarnya menaungi seluruh keberadaan masyarakatnya termasuk pula didalamnya masyarakat adat tidak seharusnya mengganggu atau merusak tatanan adat yang telah ada bahkan semenjak sebelum adanya negara. Hal ini tentu saja selama tatanan adat tersebut tidak melenceng dari 'rel' kesatuan negara. Keberadaan masyarakat adat dengan tatanan tradisional asli harusnya bersinergi dengan sistem

kenegaraan. Maksudnya ialah negara tidak boleh merusak keyakinan masyarakat adat baik itu secara struktural kelembagaan adat, keyakinan, spiritualisme dan hal lain yang sifatnya menjadi kekhasan suatu masyarakat adat dan negara seharusnya melakukan perlindungan khusus, sebaillnya kehadiran masyarakat adat ditengah-tengah negara harus tetap berada dalam jalur kesatuan.

Keberadaan masyarakat adat harus dijadikan aset penting bagi pemerintah. Sebab di era modernisasi seperti sekarang sangatlah jarang kita jumpai komunitas-komunitas masyarakat yang dengan bersungguh-sungguh menjaga kelestarian lingkungan hidup disekitarnya serta mempraktekkan pola hidup kesederhanaan, kejujuran, gotong royong, serta kegigihan yang berlandaskan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari

Akan tetapi kesakralan nilai-nilai lokal dalam masyarakat adat, misalkan masyarakat adat Amma Toa yang menjunjung tinggi *Pasang ri Kajang* seakan mengalami pertanda masa degradasi. Ini terlihat secara kasat mata terlebih kepada masyarakat diluar wilayah adat yang seakan tidak lagi menghargai dan menempatkan kepercayaan masyarakat adat Kajang sebagaimana mestinya.

Perkembangan pesat teknologi dan modernisasi pun seakan 'terang-terangan menyerang' eksistensi nilai dalam masyarakat adat Amma Toa. Kini kita dengan mudahnya melihat hal-hal yang bersifat teknologi modern, seperti kamera, handphone dan sebagainya bebas keluar masuk kawasan adat

melalui kehadiran para wisatawan yang hendak mengetahui kehidupan masyarakat Amma Toa padahal jelas dalam nilai-nilai lokal masyarakat setempat yang diatur dalam kitab *Pasang* menolak masuknya teknologi diwilayah mereka yang dianggap dapat mengubah pola pikir sederhana masyarakatnya.

Keteguhan masyarakat adat menjaga lingkungan hidup serta nilai-nilai adat yang mereka junjung tinggi mestinya didukung semua pihak dan terutama pemerintah yang harusnya lebih berpihak kepada masyarakat adat dan keutuhan hutan yang dijadikan sumber kehidupan bagi masyarakatnya.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengangkat judul tentang **Peran Pemerintah Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Adat Amma Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba** guna mengetahui sejauh manakah kepedulian pemerintah terhadap kekayaan budayanya. Sebab memasuki pertengahan tahun 2014, Rancangan peraturan daerah mengenai perlindungan masyarakat adat belum juga disahkan oleh pemerintah daerah setempat, terlebih negara belum secara eksplisit menuangkannya dalam Undang-Undang Negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi masyarakat adat Kajang terhadap nilai-nilai *Pasang ri Kajang* ?
2. Bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam pelestarian nilai-nilai masyarakat adat Kajang (*Amma Toa*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi masyarakat adat Kajang terhadap nilai-nilai *Pasang ri Kajang*
2. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba terhadap pelestarian nilai-nilai lokal masyarakat adat Amma Toa Kajang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang budaya adat Amma Toa dan peran negara dalam hal ini pemerintah terhadap

pelestarian masyarakat adat Amma Toa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam merumuskan kebijakan terhadap perlindungan, pengembangan, dan pelestarian masyarakat adat Amma Toa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek konseptual - teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsep teori yang dijadikan sebagai alat analisis terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu : 1). Tinjauan Peran, 2). Tinjauan tentang Pemerintah Daerah, 2). Masyarakat Adat, 3). Masyarakat adat Amma Toa Kajang, dan 4). Tinjauan mengenai konsep Nilai

2.1 Tinjauan Tentang Peran

Peran akan menjawab pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan seseorang dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, dan ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu. Menurut Miftah Thoha dalam Perilaku Organisasi (263:2004) peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia tak bekerja sendirian dan mempunyai lingkungan yang setiap saat ia perlukan untuk berinteraksi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.L.S Poerwadarminta disebutkan bahwa Peranan merupakan sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya

sesuatu hal atau peristiwa. Dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa peranan dapat dirumuskan kedalam beberapa pengertian, sebagai berikut:

- a) aspek dinamis dari kedudukan,
- b) perangkat hak-hak dan kewajiban,
- c) perilaku aktual dari pemegang kedudukan, dan
- d) bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.

Komaruddin (1994:768) mengkonsepkan peran (*role*) sebagai berikut:

- 1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- 2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- 3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- 4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- 5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian peran menurut Komaruddin ini, dapat ditarik sebuah pengertian bahwa peran adalah segala sesuatu tentang fungsi individu atau badan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Horton dan Hunt mengemukakan bahwa peran adalah perilaku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai status. Soerjono Soekamto (2002:243) menerangkan bahwa: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan konsep mengenai nilai-nilai dari apa yang seharusnya organisasi atau individu lakukan berkenaan dengan fungsi ataupun hak dan kewajibannya.

2.2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan undang-undang diwilayah tertentu. Menurut Suradinata, pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, territorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Inu Kencana Syafi'e (2005:18) menuliskan istilah pemerintahan berasal dari akar kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan (pe- dan –an). Jika kata perintah mendapat awalan pe- maka kata pemerintah tidak lain adalah suatu badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara. Dan jika kata pemerintah mendapat akhiran –an maka kata pemerintahan berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari

badan yang berkuasa dan terlegitimasi yang dalam kata dasar perintah terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Terdapat pihak yang memerintah (Pemerintah) dan pihak yang diperintah (Rakyat).
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
3. Pihak yang diperintah wajib untuk taat kepada pemerintah yang terlegitimasi.
4. Terdapat hubungan timbal balik antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertical maupun horizontal.

Menurut W.S Sayre dalam Inu Kencana (2005) pemerintah adalah organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Sedangkan Wilson menyebutkan bahwa pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terdiri atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini termaktub dalam amandemen ke empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa

Republik Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.

Pada Bab I Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sedangkan di ayat (2) disebutkan bahwa : “Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.” Masih pada Bab I Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.”

Dalam UUD 1945 hasil amandemen pada Bab VI pasal 18 ayat 3 dikatakan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. “Selanjutnya tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dikatakan pula bahwa, “Gubernur, Bupati, dan

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota ...”

Dengan kata lain, pemerintahan daerah adalah perangkat pemerintah di daerah beserta DPR Daerah. Jadi, Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah Gubernur beserta DPRD Provinsi. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah bupati/ walikota beserta DPRD Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat luas. Melalui otonomi luas ini pula daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, maka Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah ini harus memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan

sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Agar mampu menjalankan perannya tersebut daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam prinsip kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

Secara umum, kewenangan pemerintahan daerah mencakup semua urusan dalam bidang pemerintahan, kecuali urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kewenangan pemerintah daerah, menurut UU No. 32 Tahun 2004, ada kewenangan yang bersifat wajib dan adapula yang bersifat pilihan.

Kewenangan bersifat wajib maksudnya adalah yang mencakup semua urusan pemerintahan dalam tingkatan daerah. Sementara kewenangan yang bersifat pilihan adalah meliputi segala urusan pemerintahan yang secara nyata ada serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat sesuai dengan kondisi dan kekhasan masing-masing.

Kewenangan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Wajib menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai berikut :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. Menyusun perencancangan dan tata ruang daerah;
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Mengelola administrasi kependudukan;
- m. Melestarikan nilai sosial budaya;
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.3 Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaragaman hayati alami. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun.

Dalam konferensi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN 1982), disebutkan bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas.

Hazairin dalam Soerjono Soekanto (1981:93-94) menjelaskan cukup panjang mengenai masyarakat adat, sebagai berikut:

“Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum keluarganya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya

terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.”

Selanjutnya, maka Hazarin menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat tersebut juga terangkum di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya adalah sebagai berikut:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Indonesia sebagai negara yang paling banyak memiliki kepulauan dari kecil hingga besar, serta kelebihan dimana negara ini terdiri dari berbagai macam keaneka ragaman masyarakat adat dan memiliki ciri ke khasan tersendiri.

Sudah selayaknya keberadaan kelompok-kelompok masyarakat adat yang bertebaran diseluruh kepulauan Indonesia dan di setiap provinsi seharusnya hal yang patut dibanggakan, hal ini terjadi karena keberadaan

masyarakat adat merupakan kekayaan bangsa dan dapat menjadi sumber masukan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Baik kekayaan yang dapat menghasilkan *income* bagi negara maupun sumber ilmu pengetahuan bagi para peneliti dari seluruh benua, yang secara jelas disinilah letak salah satu manfaat keberadaan masyarakat adat sebagai sumbangsih yang dapat diberikan kepada bangsa Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara Asia ataupun Eropa yang tak jarang hanya memiliki satu masyarakat adat dan biasanya masyarakat adat tersebut malah sebagai cikal-bakal dari negara tersebut, seperti suku Indian di Amerika atau Aborigin di Australia yang justru belakangan ini banyak terpinggirkan.

Masyarakat adat adalah kunci isu perubahan iklim. Sebagai penghuni daratan dan lautan, mereka sangat rentan dari dampak perubahan iklim. Wilayah mereka sering menjadi sasaran industri skala besar penyebab perubahan iklim. Padahal telah menjadi rahasia umum bahwa kearifan lokal mereka membantu mengurangi perubahan iklim dan memberikan inspirasi bagi manusia dalam menghadapi krisis iklim.

2.4 Masyarakat adat Amma Toa Kajang

Masyarakat adat Amma Toa terletak di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, sekitar 230 KM dari Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Secara teritorial masyarakat adat Kajang terbagi kedalam dua kelompok, yaitu masyarakat Kajang Dalam dan masyarakat Kajang Luar.

Pusat kegiatan komunitas masyarakat adat Amma Toa berada di wilayah Kajang Dalam. Mereka masih menganut paham '*tallasa kamase-mase*' seperti yang diajarkan dalam *Pasang ri Kajang* secara utuh turun temurun. Berbeda dengan masyarakat di Kajang Luar yang sudah hidup berbaur dengan modernitas seperti masyarakat desa pada umumnya.

Masyarakat adat Kajang Dalam atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Adat Amma Toa hidup dalam kearifan budaya dan kesederhanaan yang khas jauh dari kesan modernitas. Dalam kesehariaannya mereka menggunakan pakaian serba hitam, seperti celana atau sarung hitam, baju hitam serta penutup kepala berwarna hitam. Menurut pemahaman mereka, warna hitam memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi. Hitam yang identik dengan gelap akan selalu mengingatkan mereka ketika masih berada di dalam rahim ibu serta ketika berada di liang lahat kelak. Mereka percaya bahwa tidak ada warna hitam yang lebih baik dari warna hitam yang lain, ini untuk mengingatkan mereka bahwa semua manusia sama dihadapan *Turiek a'arakna*.

Masyarakat Amma Toa mempraktekkan sebuah agama adat yang disebut dengan *Patuntung*. Istilah *Patuntung* berasal dari tuntungi, kata dalam bahasa Makassar yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "mencari sumber kebenaran. Ajaran *Patuntung* mengajarkan—jika manusia ingin mendapatkan sumber kebenaran tersebut, maka ia harus menyandarkan diri pada tiga pilar utama, yaitu menghormati *Turiek Akrakna*

(Yang Maha Berkehendak), tanah yang diberikan *Turiek Akrakna*, dan nenek moyang. Kepercayaan dan penghormatan terhadap *Turiek Akrakna* merupakan keyakinan yang paling mendasar dalam agama *Patuntung*. Masyarakat adat Kajang percaya bahwa *Turiek Akrakna* adalah pencipta segala sesuatu, Maha Kekal, Maha Mengetahui, Maha Perkasa, dan Maha Kuasa.

Turiek Akrakna menurunkan perintah-Nya kepada masyarakat Kajang dalam bentuk *Pasang* (sejenis wahyu) melalui manusia pertama yang mereka yakini bernama *Tu Manurung* yang juga sekaligus menjadi Amma Toa pertama. Secara harfiah, *Pasang* berarti pesan. *Pasang* adalah keseluruhan pengetahuan dan pengalaman tentang segala aspek dan lika-liku yang berkaitan dengan kehidupan yang dipesankan secara lisan oleh nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. *Pasang* tersebut wajib ditatati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh masyarakat adat Amma Toa.

Hidup sederhana bagi masyarakat Kajang adalah semacam ideologi yang berfungsi sebagai pemandu dan rujukan nilai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara lebih jelas tallase kamase-mase ini tercermin dalam pasang sebagai berikut:

Ammentengko nu kamase-mase, accidongko nu kamase-mase, a'dakkako nu kamase-mase, a'meako nu kamase-mase artinya; berdiri engkau sederhana, duduk engkau sederhana, melangkah engkau sederhana, dan berbicara engkau sederhana.

Anre kalumannyang kalupepeang, rie kamase-masea, angnganre na rie, care-care na rie, pammalli juku na rie, koko na rie, bola situju-tuju. Artinya; Kekayaan itu tidak kekal, yang ada hanya kesederhanaan, makan secukupnya, pakaian secukupnya, membeli ikan secukupnya, kebun secukupnya, rumah seadanya.

Jagai lino lollong bonena, kammayatempa langika, rupa taua siagang boronga. Artinya; Peliharalah dunia beserta isinya, demikian pula langit, manusia dan hutan. Pasang ini mengajarkan nilai kebersahajaan bagi seluruh warga masyarakat Kajang, tak terkecuali Ammatoa, pemimpin tertinggi adat Kajang. Masyarakat adat Kajang sangat konsisten memegang teguh prinsip *tallasa' kamase-mase* ini. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka mengimplementasikannya dalam praktek hidup sehari-hari sebagai berikut:

Bentuk rumah yang seragam, seragam bahannya, seragam besarnya, dan sedapat mungkin seragam arah bangunannya. Keseragaman itu bermaksud menghindari saling iri di kalangan mereka, yang dapat berakibat pada keinginan memperoleh hasil lebih banyak dengan cara merusak hutan.

Larangan membangun rumah dengan bahan bakunya batu-bata. Menurut pasang, hal ini adalah pantangan, karena hanya orang mati yang telah berada di dalam liang lahat yang diapit oleh tanah. Rumah yang bahan bakunya berasal dari batu-bata, meskipun penghuninya masih hidup namun secara prinsip mereka dianggap sudah mati, karena sudah dikelilingi oleh tanah.

Memakai pakaian yang berwarna hitam. Warna hitam untuk pakaian (baju dan sarung) adalah wujud kesamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Menurut pasang, tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Warna hitam untuk pakaian (baju dan sarung) menandakan adanya kesamaan derajat bagi setiap orang di hadapan *Turiek Akrakna*.

Selain ajaran *tallasa' kamasa-mase*, masyarakat adat Kajang juga memiliki mekanisme lain untuk menjaga kelestarian hutan mereka, yaitu dengan cara menetapkan kawasan hutan menjadi tiga bagian di mana setiap bagian memiliki fungsi dan makna yang berbeda bagi masyarakat adat. Ketetapan ini langsung dibuat oleh Amma Toa.

Pasang secara eksplisit melarang setiap tindakan yang mengarah pada kemungkinan rusaknya ekosistem hutan, seperti menebang kayu, memburu satwa, atau memungut hasil-hasil hutan.

Menjaga kelestarian hutan bagi masyarakat Amma Toa merupakan bagian dari ajaran *Pasang ri Kajang*, karena hutan merupakan bagian dari tanah pemberian *Turiek Akrakna* kepada leluhur Suku Amma Toa. Mereka amat meyakini bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan supranatural yang dapat mensejahterakan sekaligus mendatangkan bencana jika tidak dijaga kelestariannya. Kekuatan itu diyakini berasal dari arwah leluhur masyarakat Amma Toa yang senantiasa menjaga kelestarian hutan agar tidak rusak oleh keserakahan manusia. Jika ada orang yang berani merusak kawasan hutan,

misalnya menebang pohon dan membunuh hewan yang ada di dalamnya, maka arwah para leluhur tersebut akan menurunkan kutukan. Kutukan itu dapat berupa penyakit yang diderita oleh orang yang bersangkutan, atau juga dapat mengakibatkan berhentinya air yang mengalir di lingkungan Tanatoa Kajang.

2.5 Konsep Nilai

Nilai mengacu pada pertimbangan terhadap suatu tindakan, benda, dan cara untuk mengambil keputusan apakah sesuatu yang bernilai itu benar (mempunyai nilai kebenaran), indah (nilai keindahan/estetik) serta religious (keagamaan). Nilai merupakan kumpulan sikap dan perasaan-perasaan yang diwujudkan melalui perilaku mempengaruhi perilaku sosial yang memiliki nilai tersebut.

Nilai sosial adalah sikap dan perasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan merupakan dasar untuk merumuskan apa yang benar dan apa yang salah (Idianto Muin, 2004:108).

Nilai merupakan kumpulan kesepakatan tentang segala sesuatu yang dianggap baik dan benar, yang diidam-idamkan masyarakat. Agar nilai-nilai sosial itu dapat tercipta dalam masyarakat, maka diciptakan norma sosial dengan sanksi-sanksi sosial. Nilai merupakan penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang baik, penting, luhur, pantas, dan

mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan dan kebaikan hidup bersama.

Notonegoro membedakan definisi nilai menjadi tiga hal yaitu:

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitasnya.
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dibedakan atas nilai-nilai berikut ini:
 - a) Nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia (rasio, budi, cipta).
 - b) Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia (perasaan, estetis).
 - c) Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak atau keamanan (karsa, etika).
 - d) Nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan serta kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Sistem nilai atau nilai sosial dapat diidentifikasi melalui beberapa cirri, sebagai berikut :

- a) Konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi sosial antar warga masyarakat. Artinya nilai sosial merupakan sebuah bangunan kukuh yang berisi kumpulan aspek moral dan mentalitas yang baik yang tercipta dalam sebuah masyarakat melalui interaksi yang dikembangkan oleh anggota kelompok tersebut.
- b) Ditransformasikan dan bukan dibawa dari lahir. Artinya tidak ada seorangpun yang sejak lahir telah dibekali oleh nilai sosial. Mereka akan mendapatkannya setelah berada di dunia dan memasuki kehidupan nyata. Hal ini karena nilai sosial diteruskan dari satu orang atau kelompok kepada orang atau kelompok lain melalui proses sosial, seperti kontrak sosial, komunikasi, interaksi, sosialisasi, difusi, dan lain-lain.
- c) Terbentuk melalui proses belajar. Nilai sosial diperoleh individu atau kelompok melalui proses pembelajaran secara bertahap, dimulai dari lingkungan keluarga. Proses ini disebut dengan sosialisasi, di mana seseorang akan mendapatkan gambaran tentang nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- d) Nilai memuaskan manusia dan dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya. Artinya dengan nilai manusia mampu menentukan tingkat kebutuhan dan tingkat pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kesesuaian

antara kemampuan dan tingkat kebutuhan ini akan mengakibatkan kepuasan bagi diri manusia.

- e) Sistem nilai sosial bentuknya beragam dan berbeda antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Mengingat kebudayaan lahir dari perilaku kolektif yang dikembangkan dalam sebuah kelompok masyarakat, maka secara otomatis sistem nilai sosial yang terbentuk juga berbeda, sehingga terciptalah sistem nilai yang bervariasi.
- f) Masing-masing nilai mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap setiap orang dalam masyarakat. Artinya tingkat penerimaan nilai antarmanusia dalam sebuah kelompok atau masyarakat tidak sama, sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya.
- g) Nilai-nilai sosial memengaruhi perkembangan pribadi seseorang, baik positif maupun negatif. Adanya pengaruh yang berbeda akan membentuk kepribadian individu yang berbeda pula. Nilai yang baik akan membentuk pribadi yang baik, begitupun yang sebaliknya. Contohnya orang yang hidup dalam lingkungan yang lebih mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan kelompok mempunyai kecenderungan membentuk pribadi masyarakat yang egois dan ingin menang sendiri.

- h) Asumsi-asumsi dari bermacam-macam objek dalam masyarakat. Asumsi adalah pandangan-pandangan orang mengenai suatu hal yang bersifat sementara karena belum dapat diuji kebenarannya. Biasanya asumsi-asumsi ini bersifat umum serta melihat objek-objek faktual yang ada dalam masyarakat

Menurut Clyde Kluckhohn, semua nilai dalam setiap kebudayaan pada dasarnya mencakup lima masalah pokok berikut ini :

- a) Nilai mengenai hakikat hidup manusia. Misalnya, ada yang memahami bahwa hidup itu buruk, hidup itu baik, dan hidup itu buruk tetapi manusia wajib berikhtiar supaya hidup itu baik.
- b) Nilai mengenai hakikat karya manusia. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa manusia berkarya untuk mendapatkan nafkah, kedudukan, dan kehormatan.
- c) Nilai mengenai hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. Misalnya, ada yang berorientasi ke masa lalu, masa kini, dan masa depan.
- d) Nilai mengenai hakikat manusia dengan sesamanya. Misalnya, ada yang berorientasi kepada sesama (gotong royong), ada yang berorientasi kepada atasan, dan ada yang menekankan individualisme (mementingkan diri sendiri).

- e) Nilai mengenai hakikat hubungan manusia dengan alam. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa manusia tunduk kepada alam, menjaga keselarasan dengan alam, atau berhasrat menguasai alam.

Nilai sangat vital peranannya dalam kehidupan manusia, dalam bermasyarakat nilai merefleksikan segala tindakan yang dilakukan, kemudian mendefinisikannya menjadi sesuatu yang layak untuk diterima dan dianggap baik atau dalam lingkungan masyarakat. Jika sistem nilai sudah lenyap, maka peradaban akan mati.

Nilai yang terkandung dalam kearifan (*wisdom*) lokal suatu masyarakat merupakan pilar yang akan menopang keutuhan budaya yang telah ada dan akan diturunkan kepada generasi penerus, sebab keutuhan budaya terbentengi oleh kuatnya sistem nilai dianut dalam suatu masyarakat.

2.6 Kerangka Konseptual

Masyarakat adat Amma Toa Kajang hidup dengan kearifan lokal budaya yang sangat sederhana, mereka hidup berdampingan dengan alam sehingga mereka sangat menjaga kelestarian hutan adat mereka. Masyarakat Amma Toa menolak segala macam bentuk modernitas, terlihat dari bahan baku rumah serta isi yang semuanya berasal dari tumbuhan di alam sekitar lingkungannya.

Masyarakat Amma Toa memegang teguh kepercayaan agama yang mereka sebut *Patuntung*. Secara harfiah berarti mencari sumber kebenaran. Berdasarkan ajaran *Patuntung* jika manusia ingin mencari kebenaran harus menjalankan tiga pilar kehidupan. Yaitu, menghormati *Turiek Akrakna*, menghormati tanah adat, serta menghormati nenek moyang.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari masyarakat *Amma Toa* berpegang teguh pada pesan-pesan yang tercantum dalam *Pasang ri Kajang* sebuah kumpulan pesan lisan yang dipercaya sedari nenek moyang sampai generasi termuda. *Pasang* jika dikonsepsikan dalam Islam ibarat sebuah Al-Qur'an. Dalam *Pasang* mengatur setiap sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Amma Toa baik itu sistem kepercayaan, adat dalam upacara agama, pergaulan sosial hingga pada sistem pemerintahan dilingkup masyarakat adat.

Letak geografis komunitas adat Amma Toa yang berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara otomatis menjadi salah satu kekayaan budaya yang sangat layak dibanggakan oleh pemerintah setempat. Sebuah kondisi yang sekaligus menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba berkewajiban menjaga serta melestarikan kebudayaan asli masyarakat adat Amma Toa. Sebuah tantangan besar sebab perkembangan zaman yang kian pesat mengancam eksistensi komunitas Amma Toa.

Masyarakat Amma Toa sangat masyhur dengan pakaian serba hitam dan keteguhan mereka menjaga dan melestarikan tanah adat. Banyak pecinta budaya yang begitu mengagumi tradisi hidup mereka, sebuah kebanggaan sekaligus ancaman tersendiri bagi eksistensi nilai lokal mereka. Sebab terbukanya gerbang Amma Toa sebagai destinasi wisata budaya, secara langsung memperhadapkan masyarakat adat dengan modernitas. Sebuah kondisi yang tentu bertolak belakang dengan ajaran *Pasang*. Destinasi wisata ini tentu saja menguntungkan pariwisata Kabupaten Bulukumba namun mengancam konsistensi nilai *Pasang ri Kajang*.

Masyarakat Amma Toa sebagai komunitas yang patuh terhadap nilai-nilai *Pasang ri Kajang* perlahan seakan mengalami distorsi politik dan modernitas. Sebagaimana yang diketahui bahwa kekuasaan *Amma Toa* sebagai pejabat tertinggi pemerintahan dan politik di kawasan adat, perlahan namun pasti terlihat mengalami degradasi peran menjadi sebatas pemimpin dalam ritual adat. Seperti yang dituliskan oleh Ramli Palammai dan Andika Mappasomba dalam buku Sejarah dan Eksistensi Ada' Lima Karaeng Tallua di Kajang (2012) bahwa tatanan adat yang telah berjalan secara turun temurun melebur kedalam konstalasi sistem negara.

Untuk mengetahui secara ringkas alur konseptual yang digunakan dalam memetakan dan mengurai masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dapat terlihat dalam skema sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual “Peran Pemerintah Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Adat Amma Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara alamiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Data yang didapat dari penelitian ini digunakan untuk memecahkan, memahami, serta mengantisipasi masalah yang sangat menunjang pada penyusunan hasil penelitian.

3.1 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Kawasan Adat Amma Toa Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

3.2 Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam urusan kebudayaan dan pariwisata di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud

atau tujuan tertentu, yang menganggap bahwa informan yang dipilih tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang sedang dilakukan.

Adapun yang menjadi menjadi informan pada penelitian ini adalah

- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba
- Kepala Kantor Kecamatan Kajang sekaligus menjabat *Labbiriya* dalam kelembagaan adat Amma Toa yang juga secara langsung menaungi Desa Tana Towa tempat masyarakat adat Amma Toa bermukim.
- Kepala Desa Tana Towa sebagai pemerintah desa yang didalamnya terdapat Kawasan Adat Amma Toa
- Pemimpin adat Amma Toa yang juga merupakan pemimpin masyarakat adat
- Pemangku adat sebagai pembantu Amma Toa mengurus hubungan masyarakat Kawasan adat dengan masyarakat umum (di luar wilayah adat).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, teknik yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu dengan berdialog secara langsung baik secara bebas maupun mendalam pada informan.
- c. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku, majalah, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Dengan demikian narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan-informan yang dianggap kompeten dalam memverikan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini.

3.4 Defenisi Operasional

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan penelitian ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Peran Pemerintah yang dimaksudkan adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba sehubungan dengan tugas dan fungsinya

sebagai pelaksana pemerintahan yang berkesinambungan dengan pelestarian masyarakat adat Amma Toa.

2. Pemerintah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba terkhusus kepada instansi-instansi yang tugas pokok dan fungsinya berkesinambungan dengan judul yang diajukan oleh peneliti seperti, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kecamatan Kajang serta Pemerintah Desa Tanah Towa.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah perangkat dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang berperan langsung dalam pelestarian serta pengelolaan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bulukumba.
4. Pemerintah Kecamatan Kajang adalah perangkat Pemerintah Daerah yang menaungi wilayah adat Amma Toa yang terletak di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
5. Pemerintah Desa Tanah Towa adalah lingkup pemerintahan yang merupakan bagian struktural dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang didalamnya bermukim komunitas Kawasan adat Amma Toa.
6. Kawasan Adat Amma Toa adalah kawasan masyarakat tradisional yang hidup secara sederhana dan sangat menghormati dan menjaga kelestarian alam yang mereka anggap sebagai sumber

kehidupan mereka, terletak di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Sehari-hari mereka menggunakan pakaian seperti sarung, kemeja, dan penutup kepala berwarna hitam, mereka hidup dengan berpedoman pada nilai yang tertuang pada *Pasang ri Kajang* sebuah alkitab yang menuntun pola kehidupan mereka

7. Nilai-Nilai masyarakat adat adalah segala bentuk pemahaman berupa norma-norma yang telah disepakati oleh leluhur masyarakat adat Amma Toa seperti tertuang dalam 'kitab' *Pasang ri Kajang* dan dilaksanakan secara konsisten turun temurun melalui generasi ke generasi masyarakat adat. Secara umum *Pasang ri Kajang* tersebut berisi tentang:
 - a) Sistem kepercayaan masyarakat adat Amma Toa,
 - b) Sistem pemerintahan,
 - c) Sistem ritus, dan
 - d) Norma Sosial

3.5 Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata secara tertulis ataupun lisan dari sejumlah data kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk

pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan, untuk memperjelas gambaran hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Profil Daerah Penelitian

Dalam rangka mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis berusaha memberikan gambaran umum daerah penelitian, yang sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 400.990 jiwa (sensus penduduk tahun 2012). Kabupaten Bulukumba memiliki 10 kecamatan, 28 kelurahan, serta 108 desa (Kabupaten Bulukumba dalam angka 2013).



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bulukumba

4.1.1 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba

A. Visi :

“Sejahterakan Masyarakat Bulukumba Dengan Membangun Desa Menata Kota Melalui Kemandirian Lokal Yang Bernapaskan Keagamaan”

B. Misi :

1. Memfasilitasi pengembangan kapasitas setiap penduduk Bulukumba agar mampu meningkatkan produktivitasnya

secara berkesinambungan serta mampu menyalurkan pendapat dan aspirasinya pada semua bidang kehidupan secara bebas dan mandiri.

2. Mendorong serta memfasilitasi tumbuh-kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua bidang kehidupan dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang memicu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
3. Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumberdaya kabupaten sedemikian rupa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta berdampak positif terhadap pengembangan kawasan sekitar.
4. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya terhadap segenap aspek kehidupan kemasyarakatan.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20" sampai 5°40" Lintang Selatan dan 119°50" sampai 120°28" Bujur Timur.

Batas-batas wilayahnya adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai
- Sebelah Selatan : Laut Flores
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng.

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan kawasan adat Amma Toa, wisata bahari, serta industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.

Adapun lokasi penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu di Kawasan adat Amma Toa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Persisnya terletak di desa Tanah Towa, sekitar 67 KM arah utara Ibu Kota Kabupaten Bulukumba.

Secara keseluruhan Luas lokasi desa Tana Towa ini yaitu 972 ha, terbagi atas luas pemukiman 169 ha, persawahan 93 ha, perkebunan 30 ha,

kuburan 5 ha, pekarangan 95 ha, perkantoran 1 ha, prasarana umum lain 5 ha dan hutan 331,17 ha dengan morfologi perbukitan serta bergelombang. Secara topografi ketinggian wilayah Desa Tanah Towa yaitu sekitar 50-200 Mdpl. Tanaman yang dibudidayakan diantaranya padi, jagung, coklat, kopi, dan sebagainya. Curah hujan di desa Tanah Towa antara 1500 – 2000 mm/tahun, kelembapan udara 70 % per tahun dengan suhu udara rata-rata 13-29 °C. Masyarakat Amma Toa mendiami 7 dari 9 dusun di desa Tanah Towa. Dua Dusun lain berada diluar kawasan Amma Toa yang kehidupannya lebih maju dan beradaptasi dengan modernitas secara langsung yaitu Dusun Jannayya dan Dusun Balagana. Pusat kegiatan masyarakat adat Amma Toa terletak di Dusun Benteng yang juga didiami oleh Amma Toa sebagai pemimpin adat. Masyarakat adat Amma Toa juga tersebar di beberapa desa antara lain, Desa Tanah Towa, Desa Bonto Baji, Desa Malleleng, Desa Pattiroang, Desa Batu Nilamung, dan sebagian Desa Tambangan.

4.1.2. Keadaan Sosial Budaya

Berikut profil desa Tanah Towa dalam tabel (data diambil berdasarkan Data Profil Desa Tahun 2014) :

1. Luas Wilayah

Tabel 4.1.1.

Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No.	Peruntukan Wilayah	Luas
1	Luas Pemukiman	169 Ha/m ²
2	Luas Persawahan	93 Ha/m ²
3	Luas Perkebunan	30 Ha/m ²
4	Luas Kuburan	5 Ha/m ²
5	Luas Pekarangan	95 Ha/m ²
6	Perkantoran	1 Ha/m ²
7	Luas Prasarana Umum Lainnya	5 Ha/m ²
8	Luas hutan	331 Ha/m ²
Total Luas		729 Ha/m ²

Sumber : Profil Desa Tana Towa Tahun 2014

2. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Tanah Towa sejak tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2014 mengalami peningkatan dari total 4131 jiwa menjadi 4625 jiwa baik laki-laki maupun perempuan.

Berikut penjabarannya dalam tabel :

Tabel 4.1.2
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Tahun		Persentase Perkembangan
		2013	2014	
1	Laki-laki	1874 jiwa	2073 jiwa	10%
2	Perempuan	2257 jiwa	2552 jiwa	12%
Jumlah		4131 jiwa	4625 jiwa	

Sumber : Profil Desa Tana Towa Tahun 2014

Peningkatan jumlah penduduk tersebut terjadi selain karena faktor kelahiran, juga disebabkan oleh adanya penduduk baru yang masuk kedalam kawasan adat Ammatoa untuk menetap setelah mempersunting laki-laki ataupun perempuan yang merupakan penduduk asli kawasan adat Ammatoa.

Menurut bapak Anshar selaku aparat pemerintah desa Tanah Towa, di dalam kawasan adat membolehkan penduduk baru yang berasal dari luar kawasan adat untuk menetap dan menjadi penduduk asli kawasan adat Ammatoa setelah melalui adat istiadat pernikahan.

Sebaliknya hukum adat di kawasan adat Ammatoa juga bisa saja memperbolehkan penduduk asli kawasan adat untuk keluar dan menetap diluar kawasan adat yang disebabkan oleh pernikahan, mencari nafkah, mengenyam pendidikan formal, dan juga pengusiran yang dikarenakan pelanggaran terhadap aturan adat.

3. Pendidikan

Tabel 4.1.3

Keadaan Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Buta Huruf	181	4.13 %
2	TK	50	1.14 %
3	SD / Sederajat	3586	81.92 %
4	SLTP / Sederajat	374	8.54 %
5	SLTA / Sederajat	113	2.58 %
6	D3/ S1 / S2/ S3	74	1.69 %
Jumlah		4378	100 %

Sumber : Profil Desa Tana Towa Tahun 2014

Pemerintah melalui program wajib belajar 12 tahun berusaha untuk memastikan usaha pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia melalui keterjangkauan pendidikan sampai ke pelosok desa. Melalui program ini maka diharapkan terciptanya sumber daya manusia yang mampu bersaing semenjak dari pedesaan, hal ini terlihat dari keseriusan pemerintah mengusahakan fasilitas berupa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas di Desa Tanah Towa.

Meski dalam realitasnya, warga desa Tanah Towa kebanyakan hanya menyelesaikan jenjang pendidikannya sampai ke tingkat Sekolah Dasar. Setidaknya hal ini mampu menekan jumlah warga yang buta huruf.

Tabel keadaan pendidikan Masyarakat di Desa Tanah Towa termasuk pula didalamnya sejumlah dusun yang didiami masyarakat adat Ammatoa memperlihatkan adanya kemauan bagi masyarakat adat untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meski tak dapat dipungkiri sejumlah masyarakat adat yang berhasil menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi cukup banyak yang memilih hidup di luar kawasan adat daripada kembali menetap di dalam kawasan adat.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Desa Tanah Towa dan masyarakat adat Ammatoa terlihat dari penempatan guru-guru sesuai kebutuhan kondisi masyarakat meskipun masih terlihat adanya perbandingan jumlah yang agak besar dari jumlah murid daripada jumlah tenaga pengajar seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.4

Jumlah Murid dan Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Guru	Murid
1	TK	4	35
2	SD / Sederajat	12	548
3	SLTP / Sederajat	14	315
4	SLTA / Sederajat	3	75
Jumlah		33	973

Sumber : Profil Desa Tana Towa Tahun 2014

5. KESEHATAN

Dalam rangka pemenuhan fasilitas kesehatan, Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang serius ke desa-desa. Khusus di desa Tanah Towa melalui data Kecamatan Kajang Dalam Angka 2013 terdapat 1 (satu) Puskesmas, 1 (satu) Puskesmas Pembantu, dan 5 (lima) Posyandu.

Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, maupun bidang tentu sangat dibutuhkan dalam menjamin keterjangkauan layanan kesehatan ke desa-desa. Di desa Tanah Towa terdapat 2 (dua) dokter, 6 (enam) perawat, 1 (satu) bidan, serta 9 (sembilan) dukun bayi.

4.2 Eksistensi masyarakat adat *Amma Toa* terhadap nilai-nilai *Pasang ri Kajang*

Pasang ri Kajang adalah pedoman hidup masyarakat Ammatoa yang berisi kumpulan amanat leluhur. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Pasang* sangat disakralkan oleh masyarakat Amma toa, menurut mereka jika amanah leluhur melalui *Pasang* tersebut tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maka akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan mereka. Dampak buruk yang dimaksud adalah rusaknya keseimbangan alam serta kacaunya sistem sosial dalam lingkungan kawasan adat.

4.2.1 Pasang ri Kajang Dalam Masyarakat Adat Amma Toa

Secara harfiah Pasang berarti pesan, meski dalam pengertian masyarakat adat Amma Toa Pasang lebih dari sekedar pesan-pesan leluhur. Pasang merupakan pedoman hidup manusia khususnya masyarakat Amma Toa dalam segala aspek, baik itu aspek keagamaan, aspek kepemimpinan pemerintahan adat, aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam Pasang juga menjelaskan tentang proses terjadinya bumi dengan berlandaskan pada mitologi masyarakat Amma Toa. Seperti yang diutarakan oleh H. Mansjur Embas seorang tokoh masyarakat adat sekaligus dewan pembina Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara dalam wawancara pada hari jumat, 19 september 2014 :

“Pasang ini merupakan petunjuk tatanan kehidupan bagi masyarakat dalam lingkup yang disebut manusia yang berada di bumi Tombolo’ sebab tanah yang pertama muncul didalam ajaran amma toa menurut pasang, sebelum ada tanah dimuka bumi ini semuanya adalah lautan. Tiba-tiba suatu saat karena kehendak turiek akrakna muncul segumpal tanah dari dalam air (lautan) dan tanah itu menyerupai tombolo, tombolo itu adalah tempurung kelapa yang dibelah dua yang dibagian atasnya ada matanya tiga, makanya itu tanah pertama disini sebagai parasangang ilau disebut tombolo. Sesudah perkembangan manusia, sudah tak bisa lagi dihindari dari interaksi sosial manusia yang sudah semakin padat dan berbagai macam jenis, beraneka ragam maka amma selaku pengemban amanah pasang dia membagi-bagi daerah keluar dan kedalam yang akhirnya disebut amma toa melahirkan adat dan pemerintah. Jadi

inilah yang disebut amma toa manak (melahirkan) adat, amma manak (melahirkan) karaeng (pemerintah). Jadi pemerintah dan adat ini dibentuk oleh amma toa.”

Pasang menyerupai ajaran agama yang mengatur pola kehidupan manusia secara holistik. Ibarat islam, *Pasang* adalah Al-Qur'an. Masyarakat Amma Toa sendiri menganut sebuah sistem kepercayaan yang disebut *Patuntung*, secara harfiah berarti mencari kebenaran. Kepercayaan *Patuntung* dikonsepsikan oleh komunitas Amma Toa kekinian bukan sebagai kepercayaan murni tapi tidak bisa juga dikatakan terlepas dari pengaruh kepercayaan lain (agama Islam). Seperti yang ditulis oleh Mansjur Embas dalam “Patuntung; Budaya spiritual Tradisional Komunitas Masyarakat Adat Amma Toa” bahwa ajaran agama Islam yang dibawa oleh Janggo Toa dan Janggo Tujarra diterima sebagai agama resmi di Tanah *Kamase-masea* (Kawasan adat Ammatoa) Oleh Amma Toa yang pada saat itu dijabat oleh Bohe' Sallang, yang juga merupakan Ammatoa pertama yang menganut agama Islam.

Dengan diterimanya Islam sebagai agama resmi di Tanah *Kamase-masea* maka secara otomatis *Patuntung* tidak lagi menjadi budaya spiritual tradisional murni akan tetapi sudah terpengaruh ideologi Islam. Hal ini seakan menimbulkan sifat mendua antara *Patuntung* dan juga Islam. Ajaran *Pasang* pun memberi legitimasi mengenai keadaan ini :

“Je’ne talluka, sambajang tangattappu”

Artinya: wudhu yang tidak pernah batal, sembahyang yang tidak pernah putus/ berhenti.

Ungkapan tersebut bermakna bahwa meski masyarakat adat Amma Toa tidak melaksanakan syariat Islam secara holistik seperti berpuasa, sholat, dan berhaji tetapi mereka meyakini telah melaksanakannya secara batiniah dan yang paling penting hal ini terlihat dari sikap keseharian masyarakat adat Amma Toa yang ramah, santun, dan bersahaja baik kepada sesama manusia maupun pada lingkungan sekitarnya.

Pasang ri Kajang berisi pesan-pesan suci yang dibawa oleh *Mula tau* (manusia pertama/ Amma Toa pertama) dari Tu Riye’ Akra’na (Yang maha berkehendak). Seperti yang diungkapkan sebelumnya peran *Pasang* dalam masyarakat adat Amma Toa sama halnya dengan firman-firman yang tertuang dalam Al-Qur’an, dengan begini perilaku keseharian masyarakat adat Amma Toa merupakan cerminan dari *Pasang* yang disampaikan turun temurun secara lisan kepada masyarakat adat Amma Toa. Kesakralan *Pasang* merupakan hal yang wajib untuk diaplikasikan dalam keseharian masyarakat adat, mereka meyakini keingkaran terhadap pesan-pesan yang termaktub dalam *Pasang* dapat mengakibatkan rusaknya keseimbangan alam, ekosistem hutan, serta keseimbangan sistem sosial. Ingkar terhadap amanah *Pasang* juga diyakini oleh masyarakat adat bisa berakibat penyakit.

Pasang ri Kajang mengandung makna pengingat, fatwa, nasehat, pengingat serta sejarah dalam kehidupan masyarakat adat Amma Toa. *Pasang* merupakan keseluruhan pengetahuan mengenai aspek-aspek duniawi, akhirat, mitos, silsilah serta legenda. Dalam keyakinan masyarakat Amma Toa *Pasang* adalah kumpulan pengetahuan yang tidak hanya diakui secara internal masyarakat adat namun juga pengakuan dari masyarakat luar. Konsepsi *Pasang* yang mencakup kumpulan sejarah yang memiliki keterkaitan dengan beberapa kerajaan lain di Sulawesi Selatan diutarakan oleh Amma Toa dalam wawancara yang dilakukan penulis pada rabu, 17 september 2014 seperti berikut ini..

“Punna ri kajang pasang ri kajang punna ri luwu kitta’ ri luwu punna wajo-bone tapeng ni kelong-kelongang sejarayya ni sinri-sinrilang.”

“Kalau di Kajang namanya Pasang ri Kajang, kalau di Luwu namanya Kitab Luwu, kalau di Bone-Wajo namanya Tapeng yaitu penyampaian sejarah yang dilagukan.”

Seperti yang telah dituliskan diatas, *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman masyarakat adat Amma Toa mengatur berbagai sendi kehidupan baik itu yang bersifat duniawi maupun akhirat. Seperti yang diutarakan Amma Toa melalui wawancara di hari yang sama:

“Jari rie kunre nikua hukum, hukum adat jari punna bura-bura tauwa kunni nipatorakki hukum adat nipassalai anre tauwa nakulle abbura-bura jujurukki. Ka nikuakkang kunni tallu aturan, aturan ada’ pasang nikuakkang, sejarah silsilah. Assabbu’ jurusanna anjo hukum’a njo

pasang'a. aturan agama, paling nikuakkang kunni kejujuran; aturan agama, makatallu aturan negara"

"Jadi di sini (kawasan adat) ada yang namanya hukum adat. Misalnya kalau ada orang yang menutupi kebenaran dengan kebohongan maka akan dikenakan hukum adat, jadi orang harus jujur. Karena dalam aturan adat itu yang diutamakan. Auran adat yaitu pasang, sejarah, silsilah. Beribu hal yang diatur dalam Pasang, didalamnya ada aturan agama, kejujuran dan juga aturan negara."

H. Mansjur Embas selaku salah seorang pegiat Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara sekaligus tokoh masyarakat Kajang menjelaskan tentang pesan-pesan yang terkandung dalam *Pasang ri Kajang* yang 'menjiwai' seluruh isi *Pasang* lainnya. Dalam sistem peraturan negara, beliau menganalogikannya sebagai mukaddimah. Berikut penuturan H. Mansjur Embas dalam wawancara dengan penulis pada 19 September 2014 :

"Awal pasang ri kajang itu itu ber-ribu cabang-cabangnya dalam kehidupan. Jadi di pasang ini disebutkan mukaddimahnya pasang sebagai berikut: a'lemo sibatu a'bulo sipakpa manyuk siparampe tallang sipahua mate siroko bunting sipabasa sallu riajoa ammulu riadahang anrai-rai pamarentayya anrai tokki kala-kalau'l pamarentayya kalau' tokki."

Berikut penulis tafsirkan dalam bahasa Indonesia:

Aklemo sibatu

Akbulo Sipappa

Secara harfiah berarti “Sebuah jeruk dan sebatang bambu”. Ini merupakan semiotik atau perumpamaan yang secara filosofis bermakna persatuan dan kesatuan. Sebab sebuah jeruk biasanya berwarna hijau ataupun kuning didalamnya terdiri dari beberapa lapisan yang tidak sama tebal dan biji yang tidak sama besar. Sedangkan sebatang bambu terdiri dari banyak ruas yang tidak sama luasnya. Namun ruas inilah yang membuat sebatang bambu menjadi kokoh.

Manyuk Siparampe

Tallang Sipahua

Secara harfiah berarti hanyut saling menepikan, tenggelam saling mengangkat ke permukaan. Secara filosofis dimaknai sebagai rasa kemanusiaan yang tinggi untuk saling mengingatkan, membantu dan tidak membiarkan sesama manusia untuk tersesat dalam kehidupannya.

Mate Siroko'

Bunting Sipabasa

Bermakna saling mengakui persamaan derajat dan selalu menjaga silaturahmi antar sesama manusia.

Sallu ri ajoka

Ammulu ri adahang

Bermakna bahwa semua orang harus menaati aturan adat dan berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan bersama dan wajib menaati tata krama dalam pergaulan, siapapun yang melanggar adat maka akan dikenakan hukuman adat.

Anrai'-rai' Pammarentayya anrai' tokki

Kala'-kalaui Pamarentayya ka lau' tokki

Bermakna bahwa masyarakat harus selalu taat kepada pemerintah. Baik itu pemerintah adat maupun pemerintah negara.

Dari sekian banyak pesan dalam *Pasang ri Kajang*, pesan yang diuraikan diatas adalah yang menjadi kunci dari segala *Pasang* yang lain seperti yang dianalogikan H. Mansjur Embas yang mengibaratkannya sebagai mukaddimah (pembuka).

Kemudian dalam *Pasang* juga terdapat pesan-pesan yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan (pemerintahan) adat, sebagai berikut :

injo pammarentaya lambusu bukrung

lambusu'nuji nukaraeng

Gattannuji nu ada'

Sa'bara' nuji nuguru

peso'na naji nasandro

Bermakna:

Pemerintah itu selalu bersikap lurus dan bersifat jujur, Kejujurannya akan menjaganya sebagai pemerintah, selama ia bersifat jujur maka ia pantas menjadi pemerintah.

Berpendirian teguh, bahwa menjadi pemerintah harus teguh pada kebenaran yang dijadikan landasan pendirian. Sebab *ada' talakulle lesse, talakkulle ta lesse battu ri tappere boddong, riboddongna minjo nikua leteang ada'* (pemerintah tidak boleh inkonsisten, tidak meleset dari pendirian adat, sebab dikedudukannya terdapat keseimbangan adat).

Pemerintah harus selalu sabar, sebab selama ia memiliki sifat sabar maka ia akan selalu mampu mengajarkan hal-hal yang baik kepada rakyatnya.

Pemerintah harus selalu bertawakkal kepada *Tu Riek A'rakna* agar senantiasa dekat dengan sang pencipta. Sebab kedekatannya kepada

sang pencipta senantiasa mempermudah dalam penyelesaian masalah.

4.2.2 Prinsip *Tu Kamase-masea* Dalam Kekinian Masyarakat Amma Toa

Kekinian pola perilaku masyarakat dan masuknya hal-hal yang berbau modernitas ke dalam kawasan adat *Ammatoa* tentunya bertentangan dengan pola hidup *Kamase-mase* yang dianut dalam keseharian masyarakat adat Amma Toa sebagai wujud refleksi atas keyakinan mereka terhadap *Pasang ri Kajang*. Meski dilain sisi masih banyak masyarakat adat Amma Toa yang berpegang teguh pada tuntunan *pasang*, namun pengaruh modernitas yang begitu kencang seakan sulit dibendung oleh nilai dalam kearifan lokal masyarakat Amma Toa. Perlu diingat bahwa konsepsi *Kamase- mase* adalah wujud ideologis dan bentuk konkret dari kesadaran masyarakat Amma Toa untuk hidup sederhana.

“Anre kalumannyang kalupepeang, rie’ kamase-masea” (di tempat ini tidak ada kemakmuran, yang ada hanya kebersahaan).

Modernitas dalam lingkungan keluarga masih sebagian kecil dari hasil negoisasi kebudayaan antara adat lokal Amma Toa dan kehidupan global yang modern. Pengaruh modernitas akan semakin terasa sejalan dengan

kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. *Kamase - masea* secara ideologi adalah keniscayaan sebagaimana yang diutaraka Galla Puto selaku juru bicara Amma Toa dalam struktur adat. Jika ada masyarakat yang tidak ingin patuh pada aturan tersebut, dan atau secara sengaja berusaha meninggalkan ideologi tersebut maka ia dipersilahkan untuk keluar dari kawasan adat. Sebab hanya manusia dengan prinsip *Tu Kamase - masea* pada pemikiran dan tindakannyalah yang dapat menetap dalam kawasan adat.

Meski beberapa informan yang berhasil penulis temui khususnya yang merupakan pemangku adat termasuk pula Amma Toa masih bersikukuh bahwa aturan adat masih secara utuh dijalankan oleh masyarakat adat, namun realitas dilapangan menunjukkan bahwa beberapa aturan adat mulai mengalami degradasi dari pola tingkah laku masyarakat Amma Toa. Sebagai contoh adalah pakaian hitam yang diwajibkan dalam kawasan adat sebagai perwujudan dari prinsip *kamase-masea* perlahan namun pasti mulai ditinggalkan oleh masyarakat terkhusus mereka yang masih tergolong muda.

Adat adalah kebiasaan dalam masyarakat berupa kata-kata, perilaku dan lain sebagainya. Adat dapat diartikan sebagai hal-hal yang telah menjadi kebiasaan yang terus berulang dan berlaku dalam masyarakat. Erat kaitannya dengan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem pengetahuan yang menjadi landasan, pedoman atau acuan terwujudnya perilaku manusia.

Budaya dapat diperoleh melalui proses belajar dalam masyarakat dan lingkungan hidup manusia.

4.2.3 Eksistensi *Pasang ri Kajang* Dalam Masyarakat Adat Amma Toa

Seperti yang dituliskan sebelumnya bahwa pedoman masyarakat adat Amma Toa sehingga tercipta perilaku yang baik adalah *Pasang*. Menurunnya eksistensi aturan adat tidak terlepas dari kompleksnya dinamika hukum yang menerobos kedalam norma - norma adat. Padahal *Pasang* sebagai konsepsi pedoman hidup yang dianggap ideal dan dimistifikasi oleh masyarakat adat Amma Toa memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding aturan hukum tertulis.

Mengenai warna yang dijadikan hal prinsipil sebagai refleksi pandangan hidup *kamase-masea* dalam kehidupan masyarakat adat Amma Toa dimaknai bahwa hitam sebagai warna yang sederhana sebab tak ada warna hitam yang lebih hitam satu sama lain. Warna hitam adalah pandangan dan menyimbolkan perilaku *Kamase-mase*.

Prinsip atau pandangan hidup *kamase-masea* bagi sebagian kaum muda masyarakat Amma Toa hanya dianggap sebagai hukum normatif. Aturan adat hanya dimaknai sebagai sesuatu hal yang ketika diabaikan maka akan mendapat ganjaran berupa malapetaka (*bala*). Pahaman yang bergeser jauh dari substansi bahwa *kamase-masea* adalah segala rujukan dalam tiap tindakan yang diambil dalam keseharian masyarakat adat. Prinsip *kamase-masea* dapat dikategorikan sebagai suatu sistem pola hidup, selain ajaran

Patuntung serta *Pasang* itu sendiri. Realitasnya adalah, sesuai observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa kecenderungan arus modernitas yang masuk kedalam kawasan adat bukan hanya dibawa oleh wisatawan melainkan juga pemuda yang berasal dari dalam kawasan adat itu sendiri. Aktivitas seperti mencari nafkah atau sekedar pemenuhan kebutuhan sehari-hari mengharuskan mereka keluar masuk kawasan. Kemudahan akses transportasi seperti kendaraan bermotor pun menjadi kebutuhan meski penggunaannya masih dibatasi sampai ke gerbang dalam kawasan adat yang setidaknya merupakan bentuk penghargaan terhadap aturan adat. Namun tak dapat dipungkiri pula, realitas tersebut merupakan bentuk transformasi ilmu dan pengetahuan yang tidak utuh tentang adat dari para orang tua ke anaknya juga perlu diakui menjadi potensi degradasi nilai lokal masyarakat adat dikemudian hari sebab pemuda inilah yang kelak diharapkan menjadi penjaga nilai dalam kawasan adat Amma Toa.

Transformasi ilmu dan pengetahuan menjadi penting sebab suatu kesatuan terhadap *Pasang ri Kajang*, ajaran *Patuntung*, serta pola hidup *kamase-masea* yang kemudian membentuk sistem adat yang utuh. Sebab eksistensi masyarakat adat Amma Toa dimasa datang tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan pemuda terhadap ajaran leluhur sebab persoalan lain dalam kawasan adat Amma Toa adalah mudahnya kebiasaan menenun yang dilakukan oleh perempuan-perempuan dalam kawasan adat Amma Toa. Menenun sarung dalam kawasan adat Amma Toa dipahami sebagai

pertanda bahwa perempuan sudah menginjak usia dewasa dan siap untuk berkeluarga. Dinamika ini bisa saja disebabkan oleh mulai terbukanya kran pemikiran masyarakat adat terhadap pendidikan formal diluar kawasan sehingga perempuan setempat cenderung mencari penghidupan yang lebih layak diluar kawasan. Padahal pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba melalui beberapa lembaga pemerhati masyarakat adat telah melakukan berbagai usaha salah satunya berupa bantuan alat-alat tenun tradisional ke dalam kawasan adat. Namun hal ini tak akan berefek apa-apa jika kesadaran untuk melestarikan budaya lokal tak dimiliki oleh perempuan-perempuan muda kawasan adat Amma Toa, sebab observasi dilapangan membuktikan bahwa cenderung perempuan yang masih menenun adalah mereka yang sudah memasuki usia matang bahkan tergolong tua.

Dalam pandangan masyarakat adat Amma Toa, kemampuan perempuan untuk menenun sarung serta pengetahuan tentang bercocok tanam bagi kaum lelaki adalah pertanda bahwa mereka telah siap hidup mandiri dari orang tua dan telah siap untuk berkeluarga.

Secara sadar atau tidak, mau atau tidak, fakta yang terlihat dilapangan menjadi bukti bahwa masyarakat adat Amma Toa seolah telah bernegosiasi dengan modernitas. Dalam beberapa kesempatan berkunjung ke rumah masyarakat dalam kawasan adat Amma Toa penulis menemukan beberapa peralatan rumah tangga pun mulai menggunakan peralatan yang biasa ditemu ditempat umum meski Galla Puto bertegas bahwa hal seperti itu tidak

akan mengurangi kesakralan ajaran hidup sederhana yang diturunkan leluhur mereka melalui *Pasang*. Akan tetapi ini juga menjadi sedikit bukti bahwa masyarakat adat sedang atau telah bernegosiasi dengan modernitas.

Alasan utama masyarakat Amma Toa menolak modernitas sebab modernitas dapat merusak keseimbangan alam serta tatanan sosial yang telah lama dijaga oleh leluhur mereka. Alam adalah entitas penting dalam usaha menjaga agar dunia tetap seimbang. Bagi masyarakat Amma Toa menjaga keseimbangan alam adalah kewajiban bagi mereka, mereka harus membatasi diri dalam pemenuhan kebutuhan dari alam. Sebab selain untuk kelangsungan hidup mereka meyakini menjaga alam juga dapat mencegah mereka dari ancaman gaib. *Kamase-masea* telah mengajarkan bahwa hidup tak perlu bermewah-mewahan, seperti yang tertuang dalam ajaran *Pasang*:

Angnganre na rie', care-care na rie,

Pammalli juku na rie', tan koko na galung rie,

Balla situju-tuju.

Artinya: “hidup yang cukup itu adalah bila makanan ada, pakaian ada, pembeli lauk ada, sawah dan ladang ada dan rumah yang sederhana saja.”

Bagi masyarakat Amma Toa kesederhanaan adalah kekayaan batiniah yang akan mendapat ganjaran baik di akhirat. Pemahaman individu masyarakat adat Amma Toa terhadap silsilah, sejarah, dan ajaran-ajaran adat adalah kunci untuk menekan arus negoisasi budaya yang kian kencang sebab jika tidak, ancaman eksistensi nilai-nilai lokal dalam kawasan adat Amma Toa akan semakin nyata. Selain beberapa permasalahan bentuk negoisasi masyarakat adat Amma Toa yang telah dikemukakan sebelumnya

bentuk modernitas nyata yang masuk kedalam kawasan adat adalah alat komunikasi seluler. Seperti yang dikemukakan oleh Mansjur Embas dalam wawancara bersama penulis berikut ini:

“Masalah tatanan adat ammatoa masih cukup sulit untuk luntur tapi perkembangan komunikasi kemungkinan mempengaruhi adat sebab benda-benda teknologi seperti HP sudah menyentuh kedalam kawasan”

Jika persoalan ini tidak mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, baik pemerintah adat, serta pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba maka bukan tidak mungkin suatu hari masyarakat adat Amma Toa akan kehilangan identitas budayanya.

4.3 Peran Pemerintah Daerah dalam pelestarian nilai-nilai lokal masyarakat adat Amma Toa

Peran pemerintah sebagai salah satu fokus dalam penelitian ini akan spesifik membahas kebijakan yang telah dan akan diambil oleh pemerintah dalam usaha melestarikan masyarakat adat.

4.3.1 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang dimaksudkan adalah yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta pemberdayaan masyarakat adat yang diharapkan tidak saling tumpang tindih dengan hukum adat.

4.3.1.1 Payung Hukum Perlindungan Kawasan Adat Amma Toa

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2008 sampai sekarang sedang mengusahakan lahirnya peraturan daerah tentang Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang. Sejauh ini usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba telah sampai pada tahap Rancangan Peraturan Daerah dan masih dalam tahap pembahasan di DPRD Kabupaten bulukumba. Seperti penjelasan Camat Kajang A. Buyung Saputra yang juga menjabat sebagai *Labbiriya* dalam struktur adat Kajang berikut ini :

“pemda sangat memperhatikan sekali hal yang menyangkut tatanan adat ini, karena kajang ini merupakan benteng terakhir kebudayaan di daerah selatan-selatan Sulawesi artinya semua memang punya kerajaan akan tetapi tidak lagi memiliki wilayah yang jelas hanya tersisa kajang saja yang memiliki wilayah sebab itu sudah diperdakan walaupun masih tahap pembahasan tapi kalau saya berbicara sebagai labbiria maka saya mengambil wilayah adat sebagian di ujungloe sebagian di bulukumpa masuk kedalam wilayah adat amma toa kajang. Kalau saya bicara sebagai camat ya ada batas-batas wilayah yang berbeda. Jadi yang diperdakan pada awalnya adalah hutan adat, tapi untuk memperdakan itu kita harus punya cantolannya dulu. Nah cantolannya inilah yang mengenai perda pengakuan masyarakat hukum adat inilah yang masih bergulir di DPR, jadi perda tentang hutan adat belum ada nanti setelah jadi ini baru kita mengusulkan hutan adat walaupun begitu pemkab bulukumba mengakui secara de facto hutan adat. Tidak ada penggarapan di hutan yang luasnya 331, 17 H dinas kehutanan sendiri jika ada permasalahan disitu bukan polisi hutan yang

diturunkan tapi dibawah ke adat. Setelah perda ini jadi disusul perda hutan adat, kemudian setelah itu saya bercita-cita agar kawasan adat Amma Toa ini kita usul ke unesco sebagai warisan kebudayaan dunia” (Labbiriya, 18 September 2014).

Penjelasan Kepala Kecamatan Kajang sekaligus *Labbiriya* dalam struktur kelembagaan adat diatas cukup menggambarkan posisi adat dalam perspektif Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Bahwa Pemerintah Daerah sedang menggiatkan perlindungan dan pengukuhan masyarakat adat Amma Toa melalui rancangan peraturan daerah untuk mencegah potensi rusaknya kearifan lokal adat Amma Toa Kajang.

Didalam Rancangan Peraturan Daerah Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang tersebut menjamin pengakuan secara hukum formal tentang kelembagaan adat yang telah lama dimiliki masyarakat adat Amma Toa, pengakuan terhadap aset-aset adat seperti hukum adat dalam *Pasang ri Kajang*, kearifaan lokal masyarakat adat, dan banyak hal lain yang memang perlu untuk mendapatkan pengakuan oleh hukum formal.

Namun rupanya niatan baik dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba ini tidak berjalan mulus. Sebab sampai akhir tahun 2014 rancangan peraturan daerah tersebut belum juga bisa disahkan disebabkan berbagai kendala seperti misalnya tidak ada cantolan undang-undang negara secara khusus yang membahas tentang masyarakat adat. Hal lain yang cukup prinsipil adalah keengganan pihak masyarakat adat Amma Toa untuk terlalu

dicampuri oleh hukum formal sebab mereka telang dan sangat meyakini hukum adat mereka. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Djunaidi Abdillah dalam wawancara yang dilakukan bersama penulis seperti berikut ini :

“Kendalanya kita masih mencari solusi bagaimana bentuk intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah mengenai hal-hal apa saja yang boleh diatur oleh pihak pemerintah karena adat amma toa ini tidak mau banyak diatur oleh hukum formal apalagi yang memang sebelumnya sudah diatur oleh hukum adat mereka.” (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Januari 2015).

Selain rancangan peraturan daerah mengenai pengukuhan masyarakat hukum adat Amma toa Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga berencana segera setelah rampungnya ranperda pengakuan adat untuk membuat Peraturan Daerah tentang Hutan adat. Hal ini dilakukan sebab seiring perkembangan zaman, sulit untuk dipungkiri bahwa kondisi masyarakat adat Amma toa ini bisa saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum dari luar adat yang ingin meraup keuntungan dengan mengeksploitasi kekayaan hutan adat Amma Toa yang memang masih sangat alami.

Seperti yang diakui oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba bahwa usulan percepatan rancangan peraturan daerah mengenai pengukuhan masyarakat hukum adat Amma Toa dan kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah tentang hutan adat

berawal dari kekhawatiran tersebut, berikut petikan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba mengenai hal ini:

“Usulan perda itu muncul karena adanya beberapa kondisi di daerah lain, aset ataupun kelembagaan adat yang sekedar dikelola oleh masyarakat adat dan tidak diikuti dengan perda serta tidak pula diawasi oleh perda maka ada saja oknum tertentu seperti pihak swasta atau oknum lain yang masuk mencaplok dengan mengiming-imingi imbalan duit misalnya. Yang pasti pemda itu membantu mempertahankan seluruh budaya yang ada didalamnya. Selama ini kan Pemerintah cuma melakukan pembinaan makanya kami berusaha untuk memberikan jaminan kekuatan hukum sebagai perlindungan bagi kekayaan adat tradisional.”

(Djunaidi Abdillah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Januari 2015).

Pembuatan rancangan Peraturan Daerah Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Amma Toa ini merupakan produk hukum pertama yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam upaya melindungi dan mempertahankan kearifan lokal masyarakat hukum adat Amma Toa Kajang. Hal yang menggembirakan sekaligus agak mengecewakan sebab semenjak 54 tahun Kabupaten Bulukumba resmi menjadi Pemerintah Kabupaten yang menaungi Kawasan Adat Amma Toa rancangan peraturan daerah perlindungan kawasan adat baru dimulai semenjak beberapa tahun

terakhir. Oleh karena itu alangkah baiknya jika Ranperda tersebut dijadikan prioritas dalam proses legislasi di DPRD Kabupaten Bulukumba.

4.3.1.2 Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat

Amma Toa Kajang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara khusus menanungi kebudayaan asli Kabupaten Bulukumba. Termasuk pula didalamnya adalah Kawasan Adat Amma Toa Kajang.

Berkaitan dengan hal tersebut, ditahun anggaran 2013-2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadikan infrastruktur jalan menuju kawasan adat Amma Toa sebagai prioritas kerja dalam rangka memudahkan masyarakat, baik itu masyarakat adat maupun masyarakat umum untuk bisa mengakses kawasan adat sebagai destinasi wisata budaya.

Hal ini menimbulkan perspektif ibarat dua mata koin yang beda dalam satu hal, sebab menurut Pemerintah Kabupaten Bulukumba program tersebut sejatinya merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk memperlihatkan eksistensi masyarakat Hukum Adat Kajang kepada dunia sekaligus memudahkan masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berada diluar kawasan adat. Seperti kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata berikut ini:

“Di tahun anggaran 2013-2014 yang diprioritaskan pemda itu akses jalan, seperti jembatan raa. Saya pikir kalau akses jalan sudah bagus akan semakin mudah untuk mengakses kawasan adat. Selain itu dari pihak Dinas Kehutanan juga punya program sendiri agar bagaimana pemerintah membantu masyarakat adat mengelola hutan adat.” (Djunaidi Abdillah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Januari 2015).

Seperti yang penulis sampaikan sebelumnya bahwa hal ini mengundang dua perspektif, penulis memandang salah satu program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut sebagai ruang untuk sekedar mengeksplorasi keadaan masyarakat adat Amma Toa. Tidak ada masalah memang jika hanya sebatas itu, namun jika tidak diimbangi dengan program yang berkaitan dengan pembinaan dalam rangka mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat maka bisa saja akses jalan yang dimudahkan itu menjadi penghantar laju kencang modernisasi kedalam kawasan adat, yang tentunya memperhadapkan langsung antara masyarakat adat dengan kepercayaan tradisionalnya dengan kehidupan modern. Menurut hemat penulis ini hal tersebut sangat perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Selain upaya mempermudah akses menuju kawasan adat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berencana mengadakan festival rakyat dalam rangka memperkenalkan sekaligus upaya menjaga kelestarian budaya lokal masyarakat adat Amma Toa. Festival tersebut menurut penjelasan Kepala

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba berisi tari-tarian adat, pameran rumah adat, dan lain-lain. Berikut petikan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

“Dalam waktu dekat ini, pihak Pemerintah Kabupaten akan menciptakan pagelaran semacam festival nanti kita coba kordinasikan dengan aparat adat, galla’-galla’ setempat dan Labbiriya serta amma toa penamaan dan waktu pelaksanaannya. Cuma memang festivalnya dibuat di luar kawasan adat, bukan didalam kawasan adat sebab kegiatan dalam kawasan adat yang boleh dihadiri oleh orang luar kawasan itu hanya ritual adat andingingi yang bisa. Kita sepakati nanti untuk dijadikan peraturan bupati mengenai temanya, materi yang akan ditampilkan dalam festival itu. Setelah itu kita akan adakan rutin tiap tahun. Seperti festival dato tiro di Samboang, itu porsinya Kecamatan Bonto Tiro, Festival Phinisi itu porsinya Kecamatan Bonto Bahari, nah nanti ini Festival mengenai masyarakat adat amma toa akan menjadi porsinya Kecamatan Kajang.” (Djunaidi Abdillah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba. Januari 2015).

Pemerintah Kabupaten Bulukumba selain melakukan perencanaan mengenai pemberdayaan masyarakat adat Amma Toa Kajang, juga telah melakukan bentuk pemberdayaan lain. Seperti membudayakan kebiasaan perempuan penenun di dalam kawasan adat Amma Toa. Pihak Pemerintah Kabupaten Bulukumba bekerjasama dengan lembaga internasional yang ,membidangi kebudayaan telah memberikan bantuan dalam bentuk pengadaan alat penenun dalam jumlah yang lebih banyak, Uniknya, dalamn

rangka penghargaan terhadap masyarakat adat bantuan tersebut diadakan dalam bentuk bahan baku yang bersumber dari alah yang kemudian diolah oleh masyarakat adat sendiri untuk dijadikan alat tenun tradisional khas Amma Toa.

Seharusnya lebih dari itu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba selain mengadakan bantuan alat tenun juga sangat perlu memberikan bantuan pemasaran hasil tenun tersebut. Sebab menurut observasi yang dilakukan penulis kebiasaan menenun perempuan Amma Toa sudah mulai berkurang disebabkan tidak banyaknya ruang pemasaran alat tenun bagi mereka.

4.3.2 Persinggungan Antara Sistem Pemerintahan Daerah dan Kelembagaan Adat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis, konstitusi yang menjamin terlaksananya pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. Dalam UUD 1945 menjelaskan tentang bentuk dan kedaulatan. Pada Pasal 1 ayat (1) Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian pada pasal lain menyebutkan segala potensi kekayaan negara didalam Pasal 33 ayat (2) dan (3). Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup banyak orang dikuasai Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam lain yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus 1945 dan diakuinya kedaulatan Negara bangsa oleh dunia internasional pada tahun 1949 mewajibkan komposisi struktur negara terrealisasi berdasar pada petunjuk dalam aturan negara. Pemerintah mengupayakan percepatan kemandirian bahkan restrukturisasi dan nasionalisasi segala aset diberlakukan. Dengan adanya landasan tersebut maka legalitas negara semakin kuat sebagai suatu bangsa yang merdeka , tata kelola sistem beserta pembenahan perangkat pendukung segera disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat umum.

Perumusan Undang-Undang Dasar Negara inilah yang menjadi suatu ideologi dan mengharuskan setiap elemen masyarakat untuk taat pada mekanisme yang telah diatur Negara. Pada akhirnya mekanisme ini dapat membentuk regulasi pemerintahan yang terkendali secara sistematis. Terbentuklah Provinsi, Kabupaten hingga beberapa distrik yang kini menjadi kecamatan. Selanjutnya seiring dengan perkembangan zaman dan bergantinya sistem beragam aspek terus mengalami perubahan dan merambati berbagai aspek hidup masyarakat (Ramli Palammai. 2012).

Termasuk rencana pemerataan dan pemekaran wilayah secara besar-besaran serta terciptanya otoritas daerah dengan cita-cita mengembangkan potensi masing-masing. Salah satunya adalah pembangunan daerah dari yang sebelumnya disebut distrik menjadi sebuah kecamatan yang mengontrol regulasi di desa hingga kepedalaman.

Masyarakat adat Amma Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sangat mematuhi ajaran-ajaran yang termaktub dalam *Pasang ri Kajang*, seperti yang telah dibahas sebelumnya perlahan mengalami distorsi politik dan juga modernitas. Pucuk pimpinan pemerintaahan dan politik Amma Toa sebagai penguasa di Kawasan Adat bergeser kedalam fungsi ritualitas adat semata. Regulasi tatanan adat yang berjalan secara turun temurun melebur kedalam sistem negara.

Seperti yang penulis kutip dari Ramli palammai dan Andhika Mappasomba dalam buku Sejarah Eksistensi Ada' Lima Karaeng Talluadi Kajang, menyebutkan sebelum berlakunya UU No. 29 tahun 1959 Kepala Distrik atau Camat adalah *Karaeng Tallua* yang disebut *Labbiria*. Posisi yang diberikan Amma Toa untuk pemerintahan di *Tanah Loheya*. Namun penyatuan sistem tersebut menyulut disfungsi tata pemerintahan, suatu hal yang harusnya bertahan dan tetap ada namun mengalami penghilangan otoritas. *Labbiriya* dalam adat dan *Pasang* tidak sepenuhnya berjalan. Aturan dan mekanisme yang mengakibatkan suatu kemelut dalam sistem. Sebuah pilihan yang dapat saja meredupkan nilai fungsional antara pemangku adat Amma Toa khususnya *Karaeng Tallua* dan pemimpin adat tertinggi Amma Toa. Meski menurut camat Kajang A. Buyung Saputra yang juga merupakan *Labbiriya* ke 37 dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 18 September 2014 bahwa penyatuan sistem ini sudah ada sejak zaman Belanda :

*“Setelah masa transisi dari masa kerajaan lama menjadi kerajaan *ander ofdelling*. Raja kajang setelah dilantik oleh adat dilantik pula oleh pemerintahan Belanda.”*

Masih menurut Camat Kajang resistensi dari pengabaian fungsi tersebut dalam adat dapat terlihat pada penolakan Amma Toa terhadap salah seorang Camat kajang yang direkomendasikan oleh Bupati Kabupaten Bulukukumba untuk dilantik sebagai *Labbiriya*. Berikut petikan wawancara dengan *Labbiriya A. Buyung Nasution* dihari yang sama :

*“Dulu pernah dipaksakan oleh bupati andi kube dauda kalau saya tidak salah untuk melantik secara adat *karaeng multazim* dari kindang sebagai seorang camat dan juga *labbiria* akan tetapi lebah adat yang gaib mengamuk sampai pak bupati pun nyaris tewas oleh sengatan lebah tersebut”.*

Hal inilah yang kemudian menjadi dilema antara kewajiban menjalankan regulasi aturan Negara dan atau menjalankan prinsip adat sesuai aturan *Pasang* terhadap masyarakat. Begitu pula tugas dan fungsi yang dijalankan oleh para kepala desa yang berada dalam wilayah, mereka tak ubahnya sedang menjalankan dwifungsi disatu sisi sebagai pemerintah daerah yang bergerak sesuai aturan negara disatu sis mereka juga merupakan pemangku adat sebagai pelaksana *Pasang ri Kajang* yang dianugerahkan kepada mereka seabgai *Ada' Limayya*.

Yusuf Akib dalam Potret Manusia Kajang (2003) menyebutkan bahwa fungsi dan peran Amma Toa telah bergeser dari pemimpin pemerintahan adat menjadi sekedar pemimpin acara ritual keagamaan. Hal ini terjadi pasca era kemerdekaan yang diperkuat dalam 2 sampai 3 dekade terakhir. Alhasil, peran penting majelis adat untuk membantu Amma Toa dalam mengurus berbagai bidang pemerintahan skala komunitasnya semakin menyempit. Peran para pembantu Amma Toa yang lazim disebut *Kolehai* menjadi melemah. Meski begitu Amma Toa masih berpengaruh dalam mekanisme politik tradisional maupun pilihan politik di Kecamatan Kajang.

Pelaksanaan tugas yang diamanahkan Amma Toa kepada para pemangku adatnya yang mengalami dwifungsi tugas sebagai apratur negara atau pelaksana *Pasang ri Kajang* seakan melemah. Padahal pembagian kekuasaan ini termaktub dalam *Pasang ri Kajang* yaitu *Amma mana' ada' Amma Mana' Karaeng* yang artinya Amma melahirkan adat, Amma melahirkan pemerintahan. Menurut Amma Toa yang mengutip pesan dari *Pasng: anrek nakkulle nipinra-pinra punna lebba'* artinya jika sudah menjadi keputusan/ ketetapan, tidak boleh diubah lagi.

4.3.3 Struktur Kelembagaan Adat Amma Toa

Amma Toa sangat berpengaruh dalam aspek pemerintahan. Dalam amanat *Pasang* Amma Toa merupakan pucuk tertinggi dalam kelembagaan pemerintahan adat. Kelembagaan inilah yang kemudian disebut *Ada' Limayya Karaeng Tallua*. Dan selain sebagai pemimpin adat, Ammatoa bertugas sebagai penegak hukum dan membagi otoritas pemerintahan sebagaimana dipesankan dalam *Pasang Ri Kajang*. Komunitas adat Kajang menerapkan ketentuan - ketentuan adat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pemanfaatan hutan.

Dalam menjalankan kepemimpinannya Amma Toa tidak serta merta menangani semua permasalahan melainkan melalui hierarki pendelegasian kewenangan. Maksudnya jika ada persoalan di tingkat dusun, maka diselesaikan oleh pejabat berwenang begitupun didesa. Kalau persoalan tersebut tidak terselesaikan barulah Amma Toa mengambil keputusan, meski semua keputusan yang diambil oleh pejabat pembantu Amma Toa berdasarkan petuah-petuhannya. Berikut wawancara penulis dengan Amma toa berkaitan dengan hal ini:

"Ruampulo annang selaku pemangku ada' tinggi, pada todo menteri ka tiap-tiap kepala dusun bansa kunre mae ri tana toa salapang dusun salapang todo pemangku, rie to injo pemangku desa. Jari punna rie abbura-bura konjo ridesayyana oporomi mae. Ka kunre mae anre nakkulle annarima langsung laporan na bicara toi rolo dusun nampa

mae ri desa, ri desa pi mae. Ka anre dasara nibicara punna tammaing nabicara pammarenta setempat.” (Amma Toa, 17 September 2014).

Artinya: “Ada 26 orang selaku pemangku adat tinggi, seperti menteri dalam sistem pemerintahan. Tiap-tiap kepala dusun seperti di Tana Towa 9 kepala dusun maka 9 pula pemangku adat. Ada pula pemangku adat di Desa. Jadi kalau ada permasalahan di desa, dari desa baru dibawa ke sini (Amma Toa). Sebab adat tidak boleh menerima langsung laporan, harus dibicarakan dulu ditingkat dusun, baru ke desa, lalu dari desa ke sini. Karena tidak ada dasar pembicaraan kalau belum dibicarakan sama pihak yang berwenang setempat.”

Dalam pengambilan keputusan (Lebba') Amma toa senantiasa melakukan mekanisme permusyawaratan dengan masing-masing pemangku adatnya. Dan keputusan yang telah diambil dari musyawarah tersebut sifatnya tetap dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun termasuk pemerintah negara (dalam hal ini Pemda Kabupaten Bulukumba).

“Keputusan kunni arena lebba, punna ri cama'a keputusan ni tekeng. Kunnia lebba' jari aturang riolo tallu tangsilebba' ada' karaeng. Anre nakulle ni roba nai-nai injo anrubai keputusannga natabai hukum ada' nipassalai saba' punna nurobai kunni hukum ada'a tampinra ngasei lebba numainga niputusan ri tempo penjajahan sessakoo nak angadili jari puna rie kunre mae lukai lebba'a ni pitabai hukum ada' jari kunre intu anre to' nakulle na pinra raha pengadilannya punna mainga kunni. Nu mainga na putusan pengadilannga anre to' nakulle ni pinra kunni, punna nigilingi keputusannga sumber ko appasilolongang seluru injo numainga ni roba ngase amminro jari ianjo maing nibage.” (Amma Toa, 17 September 2014).

Artinya: “Disini (kawasan adat) keputusan disebut *Lebba'*. Tidak boleh lagi diubah yang menjadi keputusan, siapapun yang mengubahnya maka akan dikenakan hukum adat. Sebab kalau ada keputusan diubah maka semua keputusan yang telah diambil bahkan dari zaman penjajahan harus pula diadili dan diubah kembali. Jadi pengadilan di Bulukumba pun tidak boleh merubah keputusan adat begitu pula sebaliknya yang diputuskan pengadilan tidak boleh diubah adat.”

Oleh karena itu keputusan yang akan diambil yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, maka harus dimusyawarahkan terlebih dahulu antara adat dan Pemerintah. Hal ini juga dijamin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam wawancara dengan penulis

“Semua kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, sebelumnya dilakukan musyawarah dengan adat. Jadi tidak ada kebijakan yang diambil sebelum ada kesepakatan mutlak antara adat dengan pemerintah.” (Djunaedi Abdillah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 16 September 2014).

Pun dalam pemenuhan hak politik negara bagi masyarakat yang menetap dalam kawasan adat, Amma toa tidak diperwakilan dalam artian setiap wajib pilih berhak menentukan pilihannya sendiri. Sebab menurut Amma Toa jika ia ikut memilih maka akan menjadi ketidakadilan bagi calon lain dan menurutnya posisinya sebagai pemimpin adat akan mempengaruhi pilihan masyarakat adat oleh karena itu ia menghindari kepentingan politis baginya selaku pemimpin adat. Seperti penjelasan Amma Toa berikut ini:

“Ammile tojji ngase tauwa ri pemilihanga, rie tojji tps ri dusunnga. Ia minjo nikuakkang nihoja nuhaji’a. Cuma injo nakke anre ku andukung, seluruh nu ciddonga calon anakku kualle anak ngase biasa. Mingka punna mae kuassi’-assi’l na haji’ apore abboja suara do dalle ka punna andukunga nakke nak jelasi naik-i jari anre nakke kudukung ka kecebai punna tala naik’i”

Artinya: “Semua orang (wajib pilih) disini berhak memilih sendiri, ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimasing-masing dusun. Itulah yang disebut mencari kebaikan, hanya saja saya tidak memilih seluruh calon saya anggap seperti anak sendiri. Akan tetapi kalau mereka datang menemui, saya hanya mendoakan agar mereka teguh dalam mencari rezekinya masing-masing sebab kalau saya mendukung semua warga mengikuti pilihanku dan itu tidak adil serta salah satu diantaranya pasti akan kecewa.”

Amma Toa sebagai pelaksana, penjaga, pelestari, dan penerus nilai-nilai *Pasang ri Kajang* merupakan figur keteladanan bagi masyarakat. Menurut H. Mansjur Embas kedudukan Amma Toa lebih dominan sebagai pemimpin ke-ukhrowian. Kebutuhan warga komunitas yang akan memerlukan kekuatan supranatural, Amma Toa senantiasa terlibat dengan peranan besar sebagai perantara manusia dengan *Tu Riek Akrakna*. Urusan pemerintah (*Pammarentata*) dalam ungkapan *Pasang* disebutkan :

Iya pammarentaya

Angrong ammantai

Igitte ti caddia

Salluki ri ajoka

Anrai-rai pammarentaya, anrai tokki

Kala'-kalaui pammarentaya, kalau tokki'

Secara harfiah diartikan: Pemerintah adalah pemimpin yang harus dipatuhi perintahnya. Masyarakat harus taat pada aturan dan hukum pemerintah.

Selaku orang yang dituakan, Amma Toa berperan sebagai :

1. Pengayom dan suri teladan bagi semua masyarakat adat Amma Toa. Ia menjadi pelindung (*Sanro*) apabila terjadi wabah penyakit (*Bambang lantama*) serta jika terjadi kekacauan.
2. Sebagai penghubung manusia kepada *Tu Riek Akra'na* dan juga sebaliknya. Amma Toa berkedudukan sebagai mediator yang bertugas menghubungkan harapan dan keinginan komunitas dan juga gagasan ke-*Ilahian* dalam harmonisasi mikro dan makro kosmos dipertemukan melalui *A'nganro* (berdoa).
3. Amma Toa sebagai katup pengaman ketegangan-ketegangan sosial diantara komunitas adat. Semua masalah yang bisa diselesaikan secara adat, tidak dilanjutkan ke lembaga formal. Sebaliknya kewajiban masyarakat adat seperti pembayaran pajak dan lain-lain kepada pemerintah negara, Amma Toa sebagai perantara.

4. Bertanggung jawab terhadap pelestarian *Pasang*. Dalam kedudukannya Amma Toa dibantu oleh majelis adat yang disebut *Bali Cidong* (kolega).

Dalam membantu menjalankan peran Amma Toa maka pembagian tugas dibagi kedalam beberapa pemangku adat baik, baik itu yang mengurus adat langsung maupun pemangku yang mengurus penyelenggaraan pemerintahan. Pemangku adat yang membidangi urusan adat disebut *ada' limayya* dijabat oleh 5 orang sementara pemangku adat urusan penyelenggaraan pemerintahan disebut *karaeng tallua* yang dijabat oleh 3 orang. Berikut penjelasannya:

A. *Ada' Limayya*

Pada awalnya *Ada' Limayya* dijabat oleh anak-anak dari Amma Toa pertama, begitupun setelah anak-anak Amma Toa tersebut meninggal jabatan ini diduduki oleh keturunan berikutnya yang didasari dalam *Pasang*. Namun seiring berjalannya waktu *Ada' Limayya* kemudian diduduki oleh pemerintah setempat yaitu kepala desa baik yang berada dalam kawasan adat maupun yang berada diluar kawasan. *Ada' limayya* beranggotakan lima orang, yaitu:

1. *Galla Pantama*

Merupakan pemangku adat yang mengurus secara keseluruhan sektor pertanian dan perkebunan. Tanah sebagai tempat

tumbuhnya segala jenis tumbuhan merupakan atas permohonan *Galla Pantama* dengan berbagai bentuk perjanjian dengan *Tu Riek Akrakna*. *Galla Pantama* juga bertugas dalam merancang strategi pertanian dan merencanakan situasi terbaik dalam bercocok tanam diwilayah adat. Saat ini *Galla Pantama* dijabat oleh Kepala Desa Possi tanah.

2. *Galla Kajang*

Merupakan pemangku adat yang bertanggung jawab terhadap segala keperluan dan kelengkapan ritual *pa'nganro* (berdo'a) juga berfungsi sebagai penegak aturan dan norma dalam *Pasang*. Saat ini *Galla Kajang* dijabat oleh kepala desa tanah jaya.

3. *Galla Lombo'*

Merupakan pemangku adat yang bertanggung jawab terhadap segala urusan pemerintahan baik didalam maupun diluar wilayah adat. *Galla Lombo'* memadukan antara hukum adat dan hukum negara, *Galla Lombo'* juga merupakan *Galla'* pertama yang harus ditemui saat berkunjung kedalam kawasan adat. Saat ini *Galla lombo'* dijabat oleh Kepala Desa Tanah Jaya.

4. *Galla Puto*

Adalah pemangku adat yang bertugas sebagai juru bicara Amma Toa. *Galla Puto* bertugas mengatasi permasalahan baik itu bersifat penanganan masalah, penyelesain, maupun pengampunan.

Galla Puto juga pengawas pelaksanaan *Pasang* serta bertindak menyebarluaskan keputusan dan kebenaran yang ditetapkan Amma Toa.

5. *Galla Malleleng*

Merupakan pemangku adat yang bertugas mengatur dan mengurus persoalan perikanan, secara tidak langsung juga bertindak sebagai penyeimbang dalam pelestarian ekosistem laut. *Galla Malleleng* dijabat oleh Kepala Desa Lembanna.

Dalam membantu tugas *Ada' Limayya* dibentuk adat pelengkap yang disebut *Pattola ada'*, yaitu:

1. *Galla Bantalang*, sebagai penjaga kelestarian hutan dan sungai pada areal pengambilan *sangka'* (udang) sekaligus bertanggung jawab dalam pengadaan udang dalam acara *pa'nganro* (berdo'a).
2. *Galla Sapa*, bertugas sebagai penanggung jawab tempat tumbuhnya sayuran (*paku*) dan sekaligus pengadaan sayuran dalam acara *Pa'nganro*.
3. *Galla Ganta'*, bertugas sebagai pemelihara tempat tumbuhnya Bambu Buluh sebagai bahan memasak dalam acara *Pa'nganro*
4. *Galla Anjuru* bertanggung jawab terhadap pengadaan lauk pauk yang akan digunakan pada acara *Pa'nganro* seperti ikan Sahi, dan Tambelu.

5. *Galla Sangkala*, pengurus jahe dalam acara *Pa'nganro*
6. *Lompo Ada'* berfungsi sebagai penasihat para pemangku *ada'* *limayya* dan *pattola ada' ri tana kekea*.
7. *Kamula ada'* sebagai pembuka musyawarah dalam suatu pertemuan.
8. *Panre* bertanggung jawab dalam penyediaan perlengkapan acara ritual.

B. *Karaeng Tallua*

Adalah pemangku adat yang berperan membantu dalam bidang penyelenggaraan pemerintah dibawah garis kordinasi *amma toa*. *Karaeng Tallua* terdiri dari *karaeng kajang*, *sullehatang*, dan *Anak Karaeng (Moncong Buloa)*. *Karaeng Tallua* dalam setiap acara adat bersifat tri tunggal, maksudnya jika salah satu dari ketiganya sudah hadir meskipun dua yang lain tidak ada ditempat maka *Karaeng Tallua* sudah dianggap hadir secara keseluruhan. Berikut penjelasannya:

1. *Karaeng Kajang (Labbiriya)* merupakan jabatan yang tanggung jawabnya dalam hal pemerintahan dan pembangunan sosial kemasyarakatan berdasarkan ketentuan *Pasang* dan tidak bertentangan dengan keputusan *Amma Toa*. Selain itu *Karaeng Kajang* juga mandataris *Amma Toa* sebagai pimpinan pemerintahan dan penghubung pemerintah diluar kawasan adat. *Karaeng Tallua* atau *Labbiriya* dijabat oleh kepala kecamatan *Kajang*.

2. *Sullehatang* bertanggungjawab sebagai pimpinan administrasi pemerintahan yang menyebarkan informasi atau berita yang telah ditetapkan oleh Amma Toa di *tanah loheya* (diluar kawasan adat).
3. *Ana' Karaeng (Moncong Buloa)* bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan adat dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintahan adat.

Karaeng Tallua dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh *Pattola Karaeng* yaitu sebagai berikut:

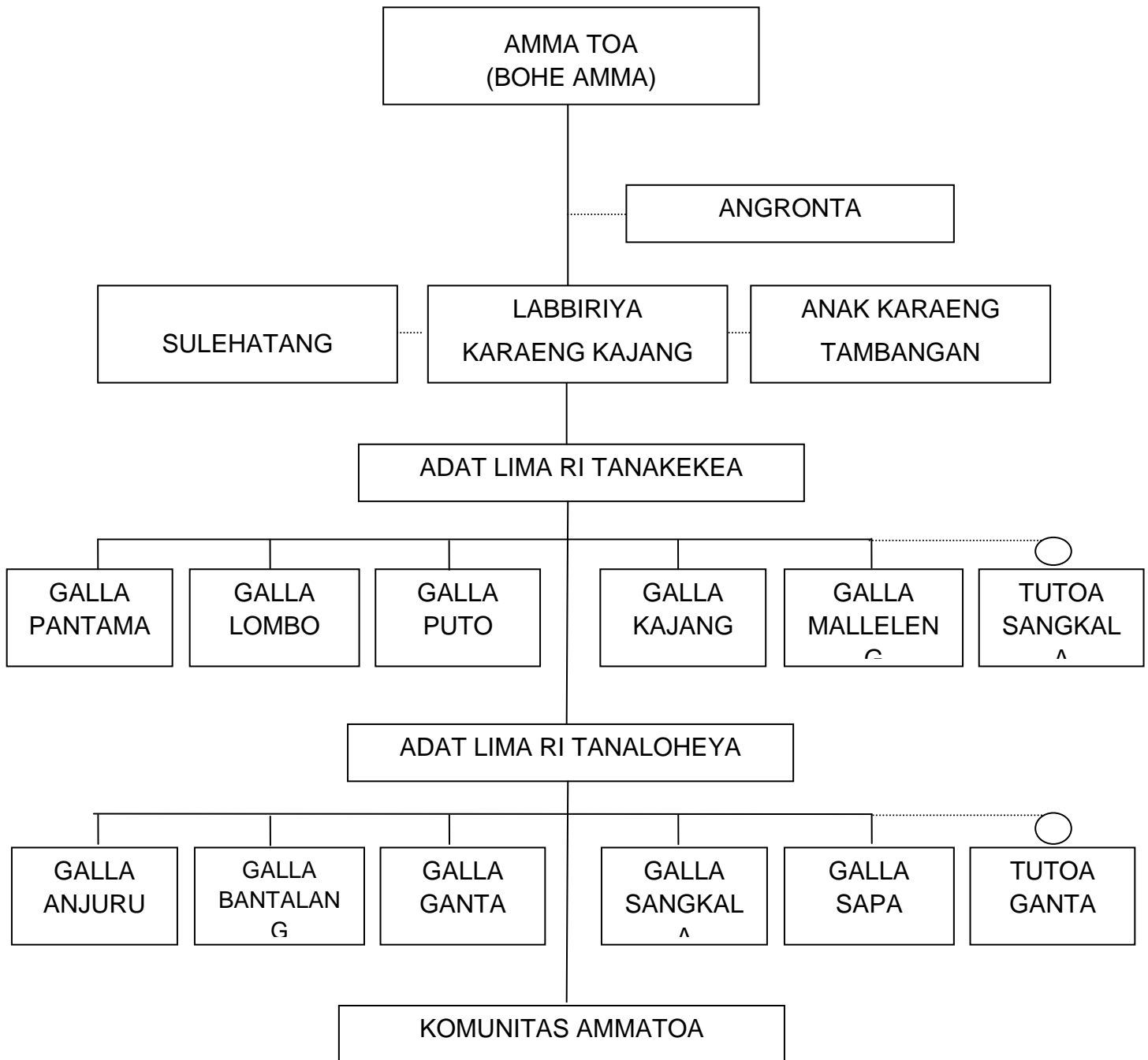
1. *Tutoa Sangkala* mengurus Lombok kecil dan *bulu* yang dipakai dalam acara *Paknganro*.
2. *Angrong Guru* sebagai pembuka acara dalam diskusi adat.
3. *Pattongko* sebagai penjaga batas wilayah.
4. *Loha Karaeng* mantan *Labbiriya*. *Loha Karaeng* ini juga bisa berperan sebagai pengganti antar waktu sebelum adanya *Labbiriya* yang dilantik secara adat, hal ini diterangkan oleh A. Buyung Saputra dalam petikan wawancara dengan penulis berikut ini :

“Jadi sebelum ada yang dianggap layak oleh adat sesuai garis keturunan maka yang mengisi posisi tersebut (labbiriya) secara adat adalah keluarga dari pejabat adat yang sebelumnya yang memenuhi persyaratan.”

5. *Kadaha* pembantu urusan *Galla Pantama*.
6. *Galla Jojjolo'* sebagai penunjuk dan tapal batas kekuasaan *Rambang AmmaToa* dan sekaligus bertindak sebagai kedutaan Amma Toa terhadap wilayah yang berbatasan dimana ia ditempatkan, misalnya *Karaeng Kajang* dengan *Karaeng Bulukumpa*.
7. *Lompo Karaeng* sebagai penasehat *Karaeng Tallua* dan *Pattola ri tanah loheya*.

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT

AMMATOA KAJANG



Gambar 4.2 Struktur Kelembagaan Adat Amma Toa

4.3.4 Eksistensi Ada' Lima Karaeng Tallua

Masyarakat adat Amma Toa menganggap *Pasang* sebagai sesuatu wujud yang diterima diluar dari ke-ilmiahan manusia. Ajaran *Pasang* melahirkan suatu perintah, nasihat, maupun sejarah atau silsilah (kisah). Berdasarkan ajaran tersebut yang diterima oleh Amma Toa pertama dari *Tu Rie' A'rakna* untuk selanjutnya disampaikan kepada Amma toa berikutnya, serta dijalankan oleh generasi-generasi setelahnya.

Struktur kelembagaan dalam pemerintahan adat Amma Toa dalam *Pasang* adalah sebuah lembaga politik dan pemerintahan. Perangkat pemerintahan masyarakat adat Amma Toa dipilih dan dilantik berdasarkan kriteria yang sudah turun-temurun yaitu berdasarkan garis keturunan dari pemerintah masyarakat adat Amma Toa sebelumnya. Menurut H. Mansjur Embas dalam wawancara dengan penulis bahwa "*bentuk demokratisnya masyarakat Amma Toa, nda mesti ammanagna karaeng anakna karaeng to'i*". Maksudnya adalah garis keturunan yang dimaksudkan adalah tidak mesti garis keturunan ayah-anak tapi sebatas saudara sepupu pun sudah dianggap memiliki garis keturunan langsung.

Hal ini juga berarti bahwa walaupun seseorang terpilih menjadi pemerintah dalam perspektif aturan negara namun ia tidak serta merta bisa dilantik menjadi pejabat adat (pemangku adat). Misalnya seseorang ditunjuk oleh pemerintah negara (dalam hal ini pemerintah daerah) sebagai Kepala Kecamatan Kajang tapo orang tersebut tidak memiliki garis keturunan dari

pemimpin adat sebelumnya (*Labbiriya*) maka ia tidak boleh dilantik sebagai *Labbiriya*. Hal ini dikemukakan oleh A. Buyung Saputra (*Labbiriya* dan Camat Kajang) dalam sesi wawancara dengan penulis:

“tidak semua dilantik secara adat, sebab jika bukan keturunannya maka ia tidak boleh dilantik secara adat meski tetap menjabat sebagai pejabat negara.”

Dalam menjalankan fungsi seluruh struktur pemerintahan diamanahkan sepenuhnya kepada *Ada' Limayya* dan selanjutnya mengenai kekuasaan pemerintahan dalam *Pasang* ditugaskan kepada *Karaeng Tallua*. *Ada' Limayya* berkedudukan di *Tana Kekea* sementara *Karaeng Tallua* berperan di *Tana Loheya* (Diluar kawasan adat). Berikut penuturan *Labbiriya* (camat Kajang) A. Buyung Saputra dalam wawancara dengan penulis:

“Di kajang camat itu masuk dalam perangkat adat yang disebut la'biria masuk di karaeng tallua. Karaeng tallua terdiri dari moncong buloa (anak karaeng tambangan), sullehatang, dan la'biria. Jadi pemimpin adat tertinggi tetap amma toa tapi yang menjalankan pemerintahan adalah la'biria. Karaeng tallua sudah ada sejak dulu.” (A. Buyung Saputra, 18 September 2014).

Andi Buyung Saputra mengibaratkan kelembagaan adat Amma Toa seperti Sistem Pemerintahan di Negara Iran :

“Kajang dan Amma toa adalah sebuah kesatuan jadi kekuasaan Karaeng Tallua tidak absolut semua keputusan yang diambil adalah berdasarkan petuah dari amma toa. Jadi bisa dikatakan Kajang ini

seperti pemerintahan negara Iran dimana presiden tidak berkuasa penuh tetapi berbagi dengan dewan ulama”.

Afiliasi dan pencampuran fungsi pemerintahan adat kedalam pemerintahan negara berakibat pada fungsi ganda dalam pelaksanaan sistem oleh aparat adat dan aparatur negara. Menurut *Galla' Pantama* :

Selaku adat tertua di Kajang dan anak tertua dari Amma Toa. Galla' Pantama memiliki fungsi sebagai penerima adat yang berhubungan dengan kawasan Amma Toa. Jadi Pantama ada juru kunci masuk ke Amma Toa. Secara silsilah beliau sekarang adalah Galla' Pantama yang ke 10 yang masih turunan langsung dari Galla' Pantama yang pertama yaitu Karaeng Bongki, ke A'nisi, ke Ramba Dg Maroa, turun ke sepupunya yang bernama Sossong kemudian ke anaknya Pontu Dg Marajang, ke anaknya Salikki Dg Siratang. Lalu turun ke So'long Dg Palallo, Pontu dg Marala ke Ambo Adi dan ke beliau sekarang inilah yang merangkap sebagai kepala desa.(Galla Pantama, Rabu 17 September 2014).

Dinamika kebudayaan di tanah adat Amma Toa secara terus menerus mengalami pergeseran. Dulu, sebelum adanya negara sebutan bagi pemangku adat adalah *Galla'* gelaran bagi orang yang memiliki jabatan dalam struktur adat. Namun setelah negara ada, penyebutan *Galla'* lebih dominan sebagai kepala desa yang merangkap dalam tatanan sistem yang jelas berbeda, yaitu sistem pemerintahan negara dan sistem pemerintahan adat. Kondisi ini tanpa mendiskreditkan orang per-orang, tapi bisa saja

dengan kekuasaan pada dua tahta jabatan sekaligus rawan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Amma Toa mengingatkan:

Tu sunikiria-kira sala injo mange anu do niakka' akkalli sala tauwa ka akkala intu kunni politik kau. Jari kau gaukang politik haji'a lalang mae ni gaukang akkala haji'a ka nikua paka pore akkala'nu akkalaya haji'a ako akka'-kalai tauwa I kau aklukka nu kua I baco mange aklukka. Paka pore politiknu, politik nu balloa.

Maksudnya:

Dalam tanah adat, politik disebut akal. Jadi semua yang dilakukan adalah akal yang baik. Perkuat akalmu, akal yang baik. Jangan akal-akali orang lain, contohnya kau yang mencuri tapi kau sebut si Baco yang melakukan pencurian. Perkuat akal/ politikmu, akal/ politik yang baik. (Amma Toa, 17 September 2014).

Pesan Amma Toa tersebut setidaknya menjadi pengingat agar tidak melakukan *akkala sala* kepada sesama apalagi jika pejabat adat maka sangat haram untuk melakukan akal sesat seperti mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum.

Keyakinan masyarakat adat Amma Toa bahwa kepemimpinan Amma Toa adalah tunggal. Sekalipun beberapa tahun yang lalu sempat terjadi dualisme kepemimpinan Amma Toa disebabkan adanya penhgklaiman dari masing-masing pihak adat. Tentu saja hal ini berpotensi memecah eksistensi dari masing-masing peran pemangku adat. Dualisme yang sempat berujung pada dualisme pemangku adat baik *Ada' Limayya* maupun *Karaeng Tallua*

yang semakin memperkeruh kondisi adat Amma Toa. Namun melalui musyawarah panjang pihak adat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba persoalan yang bermula dari kepentingan politik sejumlah oknum yang memainkan peran ganda sebagai pejabat adat dan pejabat negara dapat teratasi.

Kehadiran Undang-Undang Desa yang baru-baru ini disahkan oleh Pemerintah Pusat serta Rancangan Peraturan Daerah yang sementara dirumuskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba memberikan angin segar keberlangsungan masyarakat adat Amma Toa yang sejalan dengan amanah *Pasang ri Kajang*. Sebab masyarakat adat Amma Toa sekalipun sangat menghargai keberadaan negara melalui hukum adat yang disejajarkan dengan hukum adat. Maksudnya, seperti penjelasan Amma Toa misalkan hukum kriminal yang dilanggar oleh masyarakat adat jika sudah dikenakan hukuman adat sementara negara mewajibkan peradilan sesuai hukum negara maka yang melanggar boleh dikenakan hukuman negara yang berlaku. Sesuai penganalogian Amma Toa dalam wawancara dengan penulis berikut ini :

“Injo aturanga kunni kerjasama pammarenta. Ka contona nakke nulukka tedongku sikaju, nu sambei rua mangeko kupassala sampulo anrua reala punna doi sampulo anrua juta maeki ri polisi.” (Amma Toa, 17 September 2014).

Artinya: “Aturan disini (Kawasan adat) bekerjasama dengan pemerintah. Misalnya ada ada yang mencuri satu ekor kerbau, secara adat si pencuri ini harus menggantinya dengan dua ekor kerbau, lalu di denda dengan 12 real atau Rp 12 juta setelah itu dibawa ke Polisi sebagai hukuman negara.”

Analogi yang dijelaskan Amma Toa tadi setidaknya memberikan gambaran, bahwa masyarakat adat Amma Toa sangat menghargai dan mengakui aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu dalam rangka menjaga, dan melestarikan budaya asli Indonesia ditengah-tengah arus kencang modernisasi maka sangat diperlukan adanya sinergitas antara Pemerintah Negara secara umum dan Pemerintah Daerah secara khusus dengan Masyarakat adat Amma Toa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Eksistensi masyarakat adat Amma Toa Kajang terhadap nilai-nilai dalam *Pasang ri Kajang* sudah mulai tergerus dan pengamalannya tidak lagi sekuat dahulu seiring dengan perkembangan zaman. Modernitas sebagai bentuk negoisasi masyarakat adat dengan kekinian zaman mulai intens memasuki pintu gerbang kawasan adat Amma Toa. Terbukti dengan adanya warga adat yang memiliki dan menggunakan telepon genggam serta beberapa diantaranya memiliki kendaraan bermotor, meski dengan berbagai alasan pembenaran bahwa telepon seluler memudahkan mereka berkomunikasi dengan sanak family ditempat lain dan kendaraan bermotor yang mereka gunakan memudahkan aktifitas mereka diluar kawasan. Mereka juga mengelak bahwa penggunaan kendaraan bermotor tidak melanggar *Pasang* sebab mereka hanya menggunakannya di *Tana Loheya* (tanah di luar kawasan adat) bukan dalam kawasan adat. Tapi apapun itu, fenomena diatas telah menunjukkan bahwa kawasan adat Amma Toa sedang bersusah payah menahan gempuran modernitas kedalam sendi kehidupan masyarakat mereka. Belum lagi fakta lain

penggunaan pakaian serba hitam dalam kawasan yang seolah tidak diindahkan lagi oleh generasi muda masyarakat adat Amma Toa. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pengamalan *Pasang ri Kajang* dalam keseharian masyarakat adat Amma Toa mulai tergerus oleh kehadiran modernitas kedalam kehidupan masyarakat adat itu sendiri.

2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba sejauh ini hanya sebatas melakukan pemberdayaan dan pembinaan dalam upaya mempertahankan kelestarian nilai-nilai lokal masyarakat adat Amma Toa Kajang. Pemberdayaan tersebut masih sebatas pemberian bantuan alat tenun untuk membudidayakan kebiasaan menenun perempuan adat Amma Toa, pemberian bantuan infrastruktur berupa aspal jalan menuju kawasan adat. Bantuan pengadaan batu untuk jalan tradisional dalam kawasan adat. Serta perencanaan pelaksanaan festival adat untuk melestarikan kebudayaan lokal masyarakat Amm Toa. Adapu peran Pemerintah Kabupaten dalam meberikan perlindungan hukum, masih dalam tahap perancangan peraturan daerah tentang pengukuhan masyarakat hukum adat Amma Toa Kajang. Ranperda tersebut pun tak kunjung menjadi peraturan daerah hingga dirampungkannya penulisan skripsi ini pada Desember 2014. Kendala dalam pembuatan ranperda tersebut selain belum adanya cantolan undang-undang negara mengenai masayrakat adat juga disebabkan oleh cukup sulitnya mempertemukan antara kewenangan

pemerintah daerah dalam mengintervensi masyarakat adat, sebab masyarakat adat Amma Toa Kajang sangat meyakini dan mengandalkan hukum adat yang telah mereka buat dan amalkan bertahun-tahun lamanya. Selain dari pada itu, sejauh ini belum ada payung hukum berbentuk peraturan daerah yang dibuat Pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap upaya perlindungan dan pelestarian nilai-nilai lokal masyarakat Adat Amma Toa Kajang.

5.2 Saran

1. Ketegasan pemangku adat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai lokal kepada masyarakat adat Amma Toa. Selain itu transformasi ilmu dan pengetahuan mengenai adat kepada generasi muda masyarakat adat Amma Toa perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif dalam usaha menjaga keutuhan tradisi dan ajaran *Pasang ri Kajang*. Pemerintah Daerah juga harus mendorong kesadaran pemangku adat dan masyarakat adat agar terus menjaga kearifan lokal masyarakat adat dan bersama-sama menahan arus modernisasi kedalam kawasan adat Amma Toa.
2. Pemerintah perlu memberikan garis batas yang jelas antara sistem pemerintahan adat dengan sistem pemerintahan negara agar tidak terjadi rangkap jabatan yang memicu berkurangnya kesakralan kelembagaan adat dan mencegah potensi penyalahgunaan

wewenang. Pemerintah Negara juga wajib menjaga, melindungi, dan melestarikan Masyarakat Adat sebagai kekayaan budaya bangsa yang akan menjadi benteng terakhir penjaga peradaban asli Indonesia. Selain itu sebagai lembaga negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adat Amma Toa Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba wajib menjaga kelestarian masyarakat adat serta menampung, menyampaikan, dan melaksanakan aspirasi masyarakat adat. Selain itu Pemerintah Daerah harus mengusahakan terbentuknya desa adat yang mandiri agar adat bisa mengurus diri sendiri tanpa perlu mengubah tatanan adat yang telah ada bahkan sejak negara ini belum merdeka. Salah satu cara dalam rangka menjaga keberlangsungan budaya lokal adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba perlu memaksimalkan promosi kebudayaan daerah termasuk diantaranya mengusulkan Kawasan adat menjadi situs kebudayaan dunia ke lembaga terkait tanpa harus mengurangi kesakralan nilai-nilai lokal masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alim, Mas Katu. 2008. *Kearifan Lokal Manusia Kajang*. Makassar :
PustakaRefleksi

Ayatroejadi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa : Local Genius*. PT Dunia
Pustaka Jaya : Jakarta.

Arief, Hasrat, dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*.
Makassar : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin

Arifin, Indar, Dr. Msi. 2010. *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial
Politik*. Pustaka Refleksi : Makassar.

Arif Tiro, Muhammad. 2011 . *Penelitian : Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Andira
Publisher : Makassar.

Akib, Yusuf. 2003. *Komunitas Berbaju Hitam*. Makassar : Pustaka Refleksi

Koentjaraningrat. 2010. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* . Jakarta :
Penerbit Djambatan

Ndraha, Talidziduhu. 2003, *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru*. PT. Asdi
Mahasatya : Jakarta.

————— 2003. *Kybernology 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. PT. Asdi
Mahasatya : Jakarta.

Palammai, Ramli. dan Mappasomba, Andhika. 2012. *Sejarah Eksistensi Ada' Lima Karaeng Tallua di Kajang*. Bulukumba : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba.

Poerwadarminta, W.L.S. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta : PT Lingkar Pena Indonesia.

Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Refika Aditama : Jakarta.

Suryaningrat, Bayu, Drs. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. PT Rineka Cipta : Jakarta

Syafi'ie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama : Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Pemerintah: Tugas Pokok dan Fungsi*. : Bumi Aksara : Jakarta

————— 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers : Jakarta

Thoha, Miftah. 2004. *Perilaku Organisasi*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. PT. Raja Grafindo Persada : Semarang.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tentang Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang